



PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT
PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(di Sumatera Bagian Selatan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi*

Disusun Oleh :
EKA HARIANTI
C1A021039

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama : Eka Harianti

NIM : CIA021039

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan (di Sumatera Bagian Selatan)

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk diuji dalam ujian komprehensif dan ujian skripsi.

Jambi, Juli 2025

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Dra. Heriberta, M.E
NIP. 196203271988032001

Pembimbing Skripsi II

Dr. Rosmeli, S.E., M.E
NIP. 198006022005012002

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Jambi

Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si
NIP. 196801241993032001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Harianti

NIM : C1A021039

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan (di Sumatera Bagian Selatan)

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan usaha penulis sendiri. Dalam penyusunannya, penulis tidak menyalin atau mengambil alih karya ilmiah pihak lain secara tidak sah. Setiap kutipan yang digunakan dalam skripsi ini bersumber dari referensi yang nyata dan disusun sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku.
2. Bila di kemudian hari terbukti bahwa poin (1) tidak benar, maka penulis bersedia menerima konsekuensi akademik, termasuk pembatalan gelar sarjana yang telah diberikan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Juli 2025



Eka Harianti
NIM C1A021039

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Penguji Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

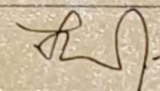
Hari : Senin

Tanggal : 07 Juli 2025

Jam : 13.00 – 15.00

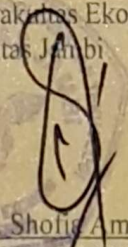
Tempat : Ruang Ujian MIE

PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Prof. Dr. Dra. Heriberia, M.E	
Penguji Utama	Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si	
Sekretaris	Dr. Rosmeli, S.E., M.E	

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jambi


Prof. Dr. Sholih Amin, S.E., M.Si
NIP. 196603011990032002

Ketua Jurusan


Dr. Rafiqi, MA
NIP. 1978022820005011003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia dan pertolongan-Nya, penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (di Sumatera Bagian Selatan)” akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis memahami bahwasanya terselesaikannya skripsi tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang telah menyisihkan waktu, mencurahkan tenaga, serta memberikan arahan dan semangat pada proses penyusunan berlangsung. Terlebih kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayah Joni Zebua dan Ibu Sarbaini serta Saudara Erwin, Herry, Virman, yang selalu mendukung, atas dorongan semangat, ketulusan pengorbanan, dan untaian doa yang tiada henti, penulis akhirnya mampu menuntaskan jenjang pendidikan hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H selaku rektor Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. Heriberta, M.E selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Dr. Rosmeli, S.E., M.E selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis pada penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Jaya Kusuma Edy, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah memberikan bimbingan akademik dan arahan selama proses perkuliahan di Universitas Jambi.
6. Bapak Ibu dosen beserta seluruh staf pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
7. Teman seperjuangan dibangku perkuliahan, Adila Agustina Indah Dwi Nanda Putri, Elfi Sefriani, Anjaswari, dan Ana Fitriani yang telah membersamai, membantu dan terus memberikan dukungan, motivasi, tenaga, dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Menutup skripsi ini, penulis sepenuhnya sadar akan sepenuhnya bahwasanya masih terdapat berbagai kekurangan dalam isi maupun penyusunannya. Maka dari itu, masukan serta saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap, apa yang telah diuraikan pada skripsi ini dapat memberikan nilai guna baik secara pribadi maupun bagi para pembaca secara luas.

Jambi, Juli 2025

EKA HARIANTI

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan (di Sumatera Bagian Selatan). Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menganalisis bagaimana dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024. 2) Untuk menganalisis pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berbagai Provinsi yang diolah menggunakan Eviews 12. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 71,24 poin. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia terendah terdapat pada Provinsi Lampung. Rata-rata Tingkat Pengangguran di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 4,31 poin. Rata-rata Tingkat Pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Lampung. Rata-rata Tingkat Pengangguran terendah terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 4,00 poin. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi terendah terdapat pada Kep. Bangka Belitung. Rata-rata perkembangan Upah Minimum di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 6,35 persen. Rata-rata perkembangan Upah Minimum tertinggi terdapat pada Provinsi Jambi. Rata-rata perkembangan Upah Minimum terendah terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Tingkat Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 10,69 poin. Rata-rata Tingkat Pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Tingkat Pengangguran terendah terdapat pada Provinsi Kep. Bangka Belitung. Adapun baik secara parsial maupun secara simultan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat kemiskinan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan.

Kata Kunci: IPM, TPT, PE, UMP, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

This study is entitled The Effect of Human Development Index, Unemployment Rate, Economic Growth, and Minimum Wage on Poverty Level (in Southern Sumatra). This study aims 1) To analyze how the dynamics of the Human Development Index, Unemployment Rate, Economic Growth, Minimum Wage and Poverty Level of Each Province in Southern Sumatra Island in 2015-2024. 2) To analyze the effect of the level of Human Development Index, Unemployment Rate, Economic Growth, and Minimum Wage on Poverty Level in the Province of Southern Sumatra Island in 2015-2024. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics of various Provinces which are processed using Eviews 12. The data were analyzed using quantitative descriptive methods. The analytical tool used is the panel data regression analysis method.

The results of this study indicate that the average Human Development Index in Southern Sumatra reviewed from five provinces from 2015-2024 is 71.24 points. The highest average Human Development Index is in Bengkulu Province. The lowest average Human Development Index is in Lampung Province. The average Unemployment Rate in Southern Sumatra reviewed from five provinces from 2015-2024 is 4.31 points. The highest average Unemployment Rate is in Lampung Province. The lowest average Unemployment Rate is in Bengkulu Province. The average Economic Growth in Southern Sumatra reviewed from five provinces from 2015-2024 is 4.00 points. The highest average Economic Growth is in South Sumatra Province. The lowest average Economic Growth is in the Bangka Belitung Islands. The average Minimum Wage development in Southern Sumatra reviewed from five provinces from 2015-2024 is 6.35 percent. The highest average Minimum Wage growth is found in Jambi Province. The lowest average Minimum Wage growth is found in Bengkulu Province. The average Poverty Rate in Southern Sumatra, reviewed from five Provinces from 2015-2024, is 10.69 points. The highest average Unemployment Rate is found in Bengkulu Province. The lowest average Unemployment Rate is found in the Bangka Belitung Islands Province. Both partially and simultaneously, the Human Development Index variable has a significant negative effect on the Poverty Rate. The Unemployment Rate and Minimum Wage have a positive and significant effect on the Poverty Rate. Meanwhile, Economic Growth does not have a significant effect on the Poverty Rate in Southern Sumatra.

Keywords: HDI, OUR, Economic Growth, PMW, Poverty Rate

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Tingkat Kemiskinan.....	10
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	15
2.1.3 Tingkat Pengangguran	17
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.5 Upah Minimum.....	21
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	23
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan.....	23
2.2.2. Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan.....	24
2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan	24
2.2.4 Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan	24
2.3 Penelitian Sebelumnya.....	25
2.4 Kerangka Pemikiran	32
2.5 Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Data dan Sumber Data	35
3.2 Metode Analisis Data	35
3.3 Estimasi Regresi Data Panel	37
3.3.1 <i>Common Effect Model (CEM)</i>	37
3.3.2 <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	37
3.3.3 <i>Random Effect Model (REM)</i>	37
3.4 Uji Penentuan Model	38
3.4.1 <i>Uji Chow atau Chow Test</i>	38
3.4.2 <i>Uji Hausman</i>	38
3.4.3 <i>Uji Lagrange Multiplier</i>	38
3.5 Uji Asumsi Klasik	38
3.5.1 Uji Normalitas	38
3.5.2 Uji Autokorelasi	39
3.5.3 Uji Multikolinieritas	39
3.5.4 Uji Heteroskedastisitas	39
3.6 Uji Statistik	39
3.6.1 Uji Parsial (Uji t)	39
3.6.2 Uji Simultan (Uji F)	40
3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)	40
3.7 Definisi Operasional Variabel	41
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....	43
4.1 Luas Wilayah Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan	43
4.2 Kondisi Demografi Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan.	44
4.3 Kondisi Ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	47
4.4 Jumlah Penduduk Miskin Masing-masing Provinsi	50
di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	50
4.5 Angka Harapan Hidup Masing-masing Provinsi	52
di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	52
4.6 Kondisi Ketenagakerjaan Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60

5.1	Dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024	60
5.1.1	Dinamika Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Provinsi.. di Pulau Sumatera Bagian Selatan	61
5.1.2	Dinamika Tingkat Pengangguran Masing-masing Provinsi..... di Pulau Sumatera Bagian Selatan	65
5.1.3	Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	69
5.1.4	Dinamika Upah Minimum Provinsi Masing-masing Provinsi..... di Pulau Sumatera Bagian Selatan	73
5.1.5	Dinamika Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan	78
5.2	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	82
5.2.1	Pemilihan Model.....	82
5.2.2	Hasil Pengujian Estimasi <i>Metode Fixed Effect Model</i> (FEM).....	84
5.2.3	Uji Asumsi Klasik	87
5.2.4	Uji Statistik	88
5.3	Hasil Pembahasan.....	91
5.3.1	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat kemiskinan	91
5.3.2	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan	92
5.3.3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	92
5.3.4	Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	93
5.4	Implikasi Kebijakan.....	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		96
6.1	Kesimpulan.....	96
6.2	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Pulau Sumatera Tahun 2024.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Luas Wilayah Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2024.....	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2020-2024.....	44
Tabel 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah) Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Miskin Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024.....	53
Tabel 4.6 Jumlah Pengangguran Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024.....	57
Tabel 5.1 Dinamika Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024.....	61
Tabel 5.2 Dinamika Tingkat Pengangguran Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024	65
Tabel 5.3 Dinamika Pertumbuhan ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024	69
Tabel 5.4 Dinamika Upah Minimum Provinsi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024	73
Tabel 5.5 Dinamika Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan.....	78
Tabel 5.6 Hasil Uji Chow.....	83
Tabel 5.7 Uji Hausman	83
Tabel 5.8 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model (FEM).....	84
Tabel 5.9 Hasil Nilai Intersep Masing-masing Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan	86
Tabel 5.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel 5.11 Hasil Heterokedastisitas	88
Tabel 5.12 Nilai t-Statistik pada Metode FEM	89
Tabel 5.13 Hasil Uji F-Statistik Pada Metode FEM	90
Tabel 5.14 Hasil Uji R-squared Pada Metode FEM	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicius circle of poverty</i>).....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Kemiskinan, IPM, Tingkat Penganggutan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum.....	103
Lampiran 2 Hasil Uji Chow	105
Lampiran 3 Hasil Uji Hausman.....	106
Lampiran 4 Hasil Regresi Data Panel FEM	107
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas	108
Lampiran 6 Hasil Uji Heterkedastisitas	108
Lampiran 7 Hasil Estimasi Pendekatan Fixed Effect Model (FEM).....	109

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sosial ekonomi yang sudah lama menjadi permasalahan yang krusial bagi Indonesia salah satunya adalah kemiskinan, yang seharusnya segera mendapatkan penanganan yang baik dan tepat agar masalah kemiskinan dapat teratasi. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keadaan kebutuhan, keterbatasan dan kelemahan di bidang kehidupan, bisa dilihat dari total masyarakat miskin yang tinggi dan mayoritas berada di wilayah pedesaan, minimnya keahlian masyarakat mengakses lapangan kerja dan kurangnya kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, tidak di daerah pedesaan saja tetapi di daerah kota besar juga masih banyak terdapat masyarakat miskin. Jika tidak mempunyai penghasilan dan modal untuk mencapai keperluan mendasar seperti konsumsi, pakaian, rumah, tingkat kesehatan dan pendidikan adalah penyebab dari kemiskinan. Dikutip dari dokumen bank Dunia yang berjudul “*June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)*”, Bank Dunia telah merevisi perhitungan garis kemiskinan global dengan mengganti acuan dari Purchasing Power Parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021, yang dirilis oleh *International Comparison Program* pada Mei 2024. Pergantian ini menyebabkan perubahan pada tiga kategori garis kemiskinan global karena perbedaan metode konversi daya beli antarnegara antara PPP 2017 dan PPP 2021. PPP digunakan untuk membandingkan harga barang dan jasa serupa di berbagai negara dengan menyesuaikan perbedaan daya beli, bukan berdasarkan nilai tukar pasar saat ini, melainkan berdasarkan paritas daya beli. Akibat pembaruan tersebut, batas garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah naik dari 3,65 menjadi 4,20 dolar AS per kapita per hari, sementara pada negara berpendapatan menengah atas meningkat dari 6,85 menjadi 8,30 dolar AS per kapita per hari. Dampaknya, jumlah penduduk miskin di berbagai negara dan wilayah meningkat signifikan. Secara global, angka penduduk miskin pada Juni 2025 mencapai 838 juta orang atau 10,5 persen dengan perhitungan PPP 2021, meningkat dibandingkan perhitungan PPP 2017 yang sejumlah 134 juta orang atau 27,3 persen pada September 2024.

Menurut Todaro dalam (Isnaini & Nugroho, 2020) perbedaan kemiskinan di setiap negara berkembang karena aspek ini:

1. Keadaan wilayah, disparitas populasi penduduk dan skala penghasilan
2. Keadaan riwayat hidup, beberapa wilayah masih dikuasai oleh negara yang lain
3. Ketidaksamaan potensi lingkungan dan potensi penduduk
4. Adanya disparitas fungsi industri negara dan swasta
5. Kurangnya peran perusahaan
6. Ketidaksamaan tingkat keterikatan kepada ekonomi yang lebih kuat dan politik di negara lain
7. Perbedaan pemindahan wewenang, sistem politik dan lembaga dalam negeri.

Pulau Sumatera, yang mencakup sepuluh provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, serta Bangka Belitung menghadapi tantangan kompleks dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah jumlah penduduk yang sangat besar, yang semakin dipengaruhi oleh arus migrasi dan urbanisasi. Jumlah penduduk yang tinggi memberikan tekanan terhadap ketersediaan infrastruktur dan lapangan kerja, yang sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, sementara peluang kerja yang tersedia tidak sebanding, sehingga memicu masalah pengangguran. Di sisi lain, jika penduduk yang besar tersebut tidak mempunyai kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka hal ini akan menjadi beban pembangunan dan berpotensi memperparah tingkat kemiskinan di kawasan Sumatera. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Berikut adalah tabel Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Pulau Sumatera.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Pulau Sumatera Tahun 2024

Wilayah	Kemiskinan (Jiwa)	IPM (%)	Tk. Pengangguran (%)	PE (%)	Upah Minimum (Rp)
Provinsi Aceh	804.530	75,36	5,75	5,17	3.460.672
Provinsi Sumatera Utara	122.801	74,02	5,6	4,95	2.809.915
Provinsi Sumatera Barat	345.730	76,43	5,75	4,33	2.811.449
Provinsi Riau	255.600	74,79	3,7	3,37	3.294.625
Kep.Riau	138.300	77,97	6,3	5,02	3.402.492
Sumatera Bagian Utara	1.666.961 (34%)	75,71	5,41	4,56	3.155.830
Provinsi Jambi	256.420	73,43	4,45	4,25	3.037.121
Provinsi Sumatera Selatan	984.240	72,3	3,97	4,96	3.456.874
Provinsi Bengkulu	281.360	73,39	3,17	4,7	2.507.079
Provinsi Lampung	941.230	71,81	4,12	4,8	2.716.497
Kep. Bangka Belitung	699.500	73,33	3,85	1,03	3.640.000
Sumatera Bagian Selatan	3.171.750 (66%)	72,85	3,91	3,94	3.071.571

Sumber: BPS sebagai Provinsi (diolah)

Table 1.1 menjelaskan bagaimana kondisi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum yang ada di pulau sumatera pada tahun 2024. Dilihat dari tingkat kemiskinan, Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu 984.240 jiwa, sedangkan untuk tingkat kemiskinan paling rendah adalah Provinsi Sumatera Utara yaitu 122.801. Untuk tingkat IPM paling tinggi adalah Kep. Riau dengan angka 77,97 persen, sedangkan provinsi paling rendah angka IPM nya adalah Provinsi Lampung dengan angka 71,81 persen. Dilihat dari tingkat pengangguran, provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi adalah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat diangka 5,75 persen, dan provinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah adalah Provinsi Bengkulu diangka 3,17 persen. Dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu 5,17 persen, sedangkan provinsi paling rendah tingkat pertumbuhannya adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan angka 1,03%. Terakhir dilihat dari upah minimum, provinsi dengan tingkat UMR paling

tinggi adalah Kep. Bangka Belitung yaitu Rp. 3.640.000, sedangkan provinsi dengan tingkat UMR paling rendah adalah Provinsi Bengkulu yaitu Rp. 2.507.079.

Dikutip dari Ruang Energi.com dan Enimekspres-Disway yang menerangkan bagian wilayah dari pulau sumatera antara lain adalah sumatera bagian utara dengan 5 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Kep. Riau. Sedangkan sumatera bagian selatan dengan 5 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Kep. Bangka Belitung. Dilihat melalui tingkat kemiskinan, Sumatera Bagian Selatan mempunyai persentase kemiskinan lebih tinggi diangka 66 persen dibandingkan Sumatera Bagian Utara dengan angka 34 persen. Sumatera Bagian Selatan dengan lima Provinsi mempunyai sumber kekayaan yang melimpah, mulai dari kekayaan potensi manusianya, kekayaan alam yang beragam dan lain sebagainya. Dari potensi yang sangat banyak ini, tentu saja Sumatera Bagian Selatan akan memberikan keuntungan bagi Sumatera Bagian Selatan seperti dari tiga bidang yang terbaik yaitu, bidang perdagangan, pertanian dan yang terutama adalah bidang pertambangan yang berupa gas yang sangat dikenal dari Sumatera Bagian Selatan, dimana ada banyak industri-industri besar yang mengelola pertambangan tersebut. Jadi permasalahan inilah yang membuat masalah Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan penting untuk dianalisis, dengan lima Provinsi yang mempunyai kekayaan yang berlimpah dan dengan sektor yang unggul di wilayah tersebut kurang mampu untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di Sumatera Bagian Selatan menjadi lebih baik.

Tingkat Kemiskinan sangat ditentukan oleh banyak sekali faktor dan indikator pembangunan, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum memiliki kaitan langsung dengan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia adalah faktor penting untuk kesejahteraan ekonomi sebuah wilayah. Kian besarnya pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah, semakin baik pula kualitas pembangunan manusianya. Perkembangan ekonomi yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan sektor ekonomi dapat membantu meningkatkan nilai pembangunan manusia di wilayah tersebut. Karena

pembangunan manusia sangat didukung dengan adanya pertumbuhan ekonomi. (Rosyadah, 2021). Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia semestinya akan dapat mengurangi angka kemiskinan, dengan adanya kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memadai. Kemiskinan dipacu langsung oleh Indeks Pembangunan Manusia sebab bernilai negatif, yang didukung oleh penelitian Nurine Syarafina Khawaja Chisti pada 6 Provinsi di Pulau Jawa.

Tingkat nilai terendah dan tertinggi untuk ukuran yang terkandung sebagai aspek Indeks Pembangunan Manusia, antara lain:

- a. Rata-rata Lama Usia Hidup : 20 – 85 Tahun (standar BPS)
- b. Harapan Lama Sekolah : 0 – 18 Tahun (standar BPS)
- c. Angka Rata-rata Lama Sekolah : 0-15 Tahun (standar BPS)
- d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan : Rp 1.007.436 – Rp 26.572.352.

Nilai IPM berkisar antar 0 sampai 80. Semakin mendekati nilai 80, alhasil IPM terindikasi semakin baik.

Mengacu pada nilai IPM, BPS mengatur tingkat pembangunan manusia suatu daerah pada empat tingkatan, diantaranya:

- a. IPM kurang dari 60 = IPM Rendah
- b. Dari angka 60-69 = IPM Sedang
- c. Dari angka 70-79 = IPM Tinggi
- d. Angka IPM lebih dari 80 = IPM Sangat Tinggi

Tingginya tingkat penduduk akan mempengaruhi tawaran kuantitas tenaga kerja yang tidak disertai dengan peluang kerja yang ada, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah pengangguran. Masalah pengangguran merupakan tantangan yang dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu kesulitan untuk mengendalikan tingkat pengangguran. Meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan, namun dalam beberapa tahun terakhir, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa lowongan pekerjaan yang tersedia belum cukup untuk menerima angkatan kerja yang terus berkembang. Hal tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Pengangguran dapat diakibatkan oleh adanya kesenjangan antara jumlah pekerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada, serta keterbatasan

keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja, yang juga berkontribusi pada fenomena *underemployment*. Pengangguran merupakan isu serius yang dapat berdampak negatif baik pada perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran dapat memicu masalah seperti kemiskinan, kejahatan, dan gangguan sosial lainnya. Dengan memaksimalkan kemampuan tenaga kerja yang ada, Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi ini tidak sekedar dapat meminimalisir tingkat pengangguran, tetapi juga memperluas kesempatan kerja yang ada, memperbaiki efisiensi penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. (Prakoso, 2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni ukuran yang dipergunakan dalam menilai jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung oleh pasar kerja, yang mencerminkan ketidaktergunaan optimal dari pasokan tenaga kerja yang tersedia. (Statistik, 2024). Dari penelitian Muhammad Ersad, Amri Amir, dan Zulgani menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh pada pendapatan di Sumatera Bagian Selatan, yang artinya juga mampu mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui pendapatan tersebut. Penelitian dari Bagus Haryo Kusumo menyatakan bahwa pengangguran dampak yang signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.

Selain tingkat pengangguran pertumbuhan ekonomi juga dapat berdampak pada tingkat kemiskinan suatu daerah, yang ditunjukkan melalui kenaikan PDRB, Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penting untuk memperhitungkan aspek pembangunan manusia, terutama pada konteks ekonomi daerah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang bermutu, kinerja ekonomi diharapkan akan lebih optimal. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat penting untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, yang pada gilirannya menjadi penghubung antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Secara sederhana, pembangunan manusia mencakup unsur produksi, distribusi berbagai komoditas, serta pemanfaatan potensi manusia. Dengan adanya pembangunan manusia yang berkualitas, tingkat kemiskinan pun diharapkan dapat berkurang secara signifikan. (BPS, 2017). Pertumbuhan ekonomi secara langsung juga

mempengaruhi tingkat kemiskinan karena bernilai positif, yang didukung oleh penelitian Nurine Syarafina pada 6 Provinsi di Pulau Jawa. Nadia Ika Purnama dalam penelitiannya juga mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi berdampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pekerja miskin, dengan cara meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. (Ayu & Faisal, 2021). Menurut PERMENAKER No. 01 Tahun 1999, upah minimum ialah jumlah upah terendah pada pekerja yang bermasa kerja di bawah satu tahun, yang mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Penentuan upah minimum dijalankan di tingkat kabupaten/kota, berdasarkan usulan Dewan Pengupahan dan pertimbangan kesejahteraan pekerja serta kondisi ekonomi daerah, dengan indikator seperti PDRB dan TPAK. (Sutama et al., 2019). Melalui penelitian Nurine Syarafina bahwa upah minimum mempengaruhi tingkat kemiskinan, Hal ini disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan penerapan upah minimum yang sekedar berlaku di sektor formal.

Menurut penelitian terdahulu oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) yang melakukan penelitian terkait “Analisis Pengaruh Indeks Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi kasus pada 6 Provinsi di Pulau Jawa)”. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya ada pada rentang waktu yang lebih panjang, yaitu mencakup sepuluh tahun dari 2015 hingga 2024, serta fokus wilayah yang spesifik pada lima provinsi di Sumatera Bagian Selatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel.

Dari pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengangkat topik tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan (di Sumatera Bagian Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang disusun menurut latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan:

1. Bagaimana dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui mempertimbangkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu seperti berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini mampu dipergunakan menjadi landasan bagi pemerintah daerah guna merancang kebijakan yang lebih efisien untuk memperbaiki IPM, mendorong pertumbuhan ekonomi, menaikkan upah minimum, serta mengurangi tingkat pengangguran.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara, tingkat Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum pada tingkat kemiskinan, serta memberikan perspektif baru dalam kajian pembangunan dan penelitian ini dapat dijadikan materi ajar dalam program pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi pembangunan, sosial, dan kebijakan publik, membantu mahasiswa memahami isu-isu kompleks dalam pembangunan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana masyarakat tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka, sebagai contohnya pangan, sandang, dan papan. Kemiskinan ini sering ditemui di negara-negara berkembang. Menurut Subandi dalam (Utami et al., 2022), kemiskinan yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak bisa berpartisipasi pada proses perubahan karena keterbatasan keterampilan dalam meraih manfaat, baik dari segi kualitas ataupun dalam memilih faktor produksi. Suparlan menjelaskan dalam (Utami et al., 2022), kemiskinan adalah kondisi di mana tingkat kehidupan masyarakat berada pada level rendah, yang mencerminkan kekurangan materi dalam standar hidup mereka. Hal ini juga mencakup kondisi penduduk yang hidup dengan kesehatan yang buruk, penghasilan yang rendah, dan akses pendidikan yang terbatas. Menurut Haungton & R. Khandker (Isnaini & Nugroho, 2020) dalam bukunya yang berjudul “Pedoman untuk Kemiskinan dan Ketimpangan” dijelaskan bahwasanya yang menyebabkan kemiskinan dapat terpengaruh oleh beragam faktor, mencakup aspek lingkungan, rumah tangga, individu, aspek penduduk, perekonomian, dan sosial.

John Maynard Keynes (1936) menyatakan bahwa kemiskinan berkembang akibat adanya pertentangan ekonomi yang dikenal dengan istilah “*poverty in the midst of plenty*”, yang berarti kemiskinan di tengah kelimpahan. Menurut Keynes, gangguan internal dan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dan pasar modal menciptakan kebiasaan penyaringan pasar yang kuat. Ia menekankan bahwa ketidakmampuan sistem untuk melakukan perbaikan otomatis menyebabkan ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan dan memperburuk kondisi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. (Edna Safitri et al., 2022).

Definisi di atas menggambarkan bahwasanya kemiskinan yakni keadaan kehidupan seseorang yang ditandai dengan kekurangan guna mencukupi kebutuhan dasar serta ketidakmampuan untuk menikmati aspek-aspek kehidupan seperti

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pendapatan yang memadai, ibadah sesuai agama, dan standar hidup yang layak.

Menurut Teori Radikal, kemiskinan akan terus berlanjut karena sistem politik dan ekonomi yang ada justru mempertahankan keadaan tersebut, menjadikan orang miskin tetap dalam kemiskinan. Negara dianggap telah merencanakan kondisi kemiskinan ini, karena kemiskinan tidak selalu persoalan keterbatasan penghasilan dan pangan, tapi juga mencerminkan ketidaksanggupan ekonomi secara keseluruhan. Pengusaha hanya mendistribusikan uang dan barang tanpa mampu mengubah struktur ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk miskin berpeluang menciptakan masalah sosial seperti keterbatasan, perasaan terpinggirkan, penurunan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan angka kriminalitas. (Utami et al., 2022).

Faktor yang berpengaruh pada kemiskinan ditentukan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial maupun politik, diantaranya adalah IPM, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum.

1. Indek Pembangunan Manusia

Kemiskinan individu terlihat dari keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemakmuran penduduk diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh UNDP, yang meliputi tiga faktor utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (tingkat melek huruf dan partisipasi sekolah), serta standar hidup layak (daya beli dan penghasilan) (Franciari, 2012)

2. Tingkat Pengangguran

Pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti penurunan daya beli karena orang yang menganggur harus mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi kesehatannya dan menyebabkan kemiskinan. Pengangguran sering terjadi akibat kurangnya lapangan pekerjaan, meskipun jumlah sumber daya manusia sangat melimpah. Ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan, ditambah dengan upaya pemerintah yang masih kurang maksimal dalam

memberikan pelatihan dan wawasan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, serta budaya malas yang masih ada, membuat banyak pencari kerja mudah putus asa dan menyerah. (Ii & Infaq, 2019)

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) mengarahkan kepada kemajuan aktivitas ekonomi yang menyebabkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada masyarakat, serta menambah kesejahteraan masyarakat. Fokus utama guna mengurangi kemiskinan adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output per kapita secara berkelanjutan. Sehingga, semakin pesat tingkat pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula tingkat kebahagiaan masyarakat. (Prasetyo, 2020).

4. Upah Minimum

Strategi kenaikan upah minimum memberikan keuntungan kepada para buruh dengan mengembangkan tingkat kesejahteraan mereka, melalui peningkatan upah, harapannya buruh akan lebih bersemangat untuk bekerja dengan lebih rajin, karena upah yang diterima sudah sesuai dengan ukuran keperluan hidup pekerja, sehingga memungkinkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan disuatu wilayah. (Faadihilah & Wiwin Priana Primadha, 2023).

Tingkatan kemiskinan bisa dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut mengacu pada keadaan di mana seseorang dinyatakan miskin apabila penghasilannya lebih rendah dari garis kemiskinan, alhasil tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang esensial untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, standar kemiskinan ini dapat bervariasi antar wilayah, seperti perbedaan kebutuhan penduduk desa dan kota, atau antara desa nelayan dan desa pertanian.
2. Kemiskinan Relatif terjadi ketika seseorang telah mencukupi kebutuhan dasar hidup, tetapi kondisinya masih jauh lebih buruk daripada orang-orang di sekitarnya. Pandangan ini menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang

dapat berubah seiring dengan perubahan tingkat kehidupan masyarakat, alhasil konsep ini bersifat dinamis dan selalu ada.

3. Kemiskinan Kultural terjadi ketika individu atau sekelompok masyarakat diklasifikasikan pada kelompok miskin karena sikap mereka yang enggan mencoba meningkatkan tingkat kehidupannya, meskipun ada bantuan dari orang lain. Artinya, individu itu miskin bukan hanya karena keadaan, tetapi juga karena sikap pemalas dan ketidakinginan untuk mengubah keadaannya. (NToolkit et al., 2010).

Indikator penyebab kemiskinan menurut Suharto dalam (Adawiyah, 2020) yaitu:

1. Faktor Individual, berhubungan dengan keadaan kesehatan kondisi jasmani dan psikologis individu yang miskin. Kemiskinan pada individu dapat disebabkan oleh pilihan, perilaku, dan kemampuan mereka sendiri dalam menjalani kehidupan.
2. Faktor Sosial, mencakup keadaan dalam wilayah sosial yang dapat menggiring individu kedalam kemiskinan, seperti diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis. Faktor ini juga meliputi keadaan sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin, yang sering kali mengarah pada kemiskinan yang terus berlanjut antar generasi.
3. Faktor Kultural mengacu pada keadaan atau mutu budaya yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Faktor ini kerap kali berkaitan dengan konsep kemiskinan kultural, yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan pola hidup sehari-hari. Perilaku-perilaku negatif seperti malas, fatalisme, atau menerima keadaan, ketidakmampuan untuk berwirausaha, dan kurangnya penghargaan terhadap etos kerja merupakan contoh dari faktor kultural yang memperburuk kemiskinan.
4. Faktor Struktural terkait dengan sistem atau struktur yang tidak merata, kurang responsif, dan sulit diakses, yang menyebabkan individu atau kelompok terjebak dalam kemiskinan. Sebagai ilustrasi, implementasi sistem ekonomi neoliberalisme di Indonesia telah mengakibatkan petani,

nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh beban pajak dan kondisi investasi yang lebih menguntungkan bagi kelompok kaya serta investor asing, sementara kekayaan terus terkumpul di tangan mereka.

Faktor kemiskinan berdasarkan Kuncoro (2000) seperti berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul sebagai konsekuensi dari ketidaksetaraan dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi timpang. Kelompok masyarakat miskin cenderung hanya dapat mengakses sumber daya yang terbatas dan kurang berkualitas.
2. Kemiskinan juga dipicu oleh kesenjangan dalam mutu sumber daya manusia, yang berimbas pada tingkat produktivitas yang rendah serta pendapatan yang tidak memadai.

Menurut Haungton & R. Khandker (2012) dalam buku *Pedoman untuk Kemiskinan dan Ketimpangan*, kemiskinan diakibatkan oleh beragam faktor yang terkait erat, contohnya karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga, individu, serta faktor kependudukan, ekonomi, dan sosial. Selain itu, penyebab kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang diperkenalkan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. Dalam teori ini, Nurkse menekankan bahwasanya "*a poor country is poor because it is poor*," yang menegaskan bilamana negara miskin tetap berada pada kemiskinan karena keterbatasan yang dimilikinya. Ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, serta kurangnya modal menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Akibatnya, pendapatan yang diterima masyarakat tetap rendah, yang selanjutnya mengurangi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi. Rendahnya tingkat investasi ini kemudian mengarah pada keterbelakangan yang terus berulang, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.(Isnaini & Nugroho, 2020).



Sumber: Nurske dalam Mudrajat Kuncoro (2020)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Program Peningkatan Pembangunan Manusia (*Human Development Improvement*) menurut UNDP bertujuan memperluas peluang hidup bagi penduduk, dengan fokus pada usia panjang, kesehatan yang baik, pekerjaan dengan pendapatan memadai, dan standar hidup yang layak. Indikator ini diukur dalam rentang angka 0 hingga 100. (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022). IPM mengevaluasi dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Pembangunan manusia fokus pada pemberdayaan penduduk dan perbaikan kualitas hidup, dengan tujuan menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. (Anoraga & Rachmansyah, 2022).

Pembangunan manusia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan nasional yang sukses tidak mampu diraih tanpa pembangunan manusia yang kuat. Sebaliknya, proses pembangunan manusia akan terhambat tanpa pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, kualitas manusia menjadi kunci utama bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya, mengoptimalkan akses pendidikan untuk seluruh masyarakat yang akan mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan membantu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan layanan kesehatan

secara nasional juga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat serta tingkat produktivitas pekerja. Dalam karyanya yang berjudul “*Development as Capability Expansion*”, Amartya Sen (1990) mengungkapkan bahwasanya pembangunan manusia merupakan perluasan pilihan bagi individu untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak fundamental lainnya. Ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, individu dapat berkontribusi secara bebas terhadap pembangunan negara. Maka dari itu, pada konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan tidak sekedar dinilai dari kemajuan ekonomi, melainkan dari sejauh mana seseorang memiliki kebebasan untuk menjangkau sumber daya dan mencukupi kebutuhan hidup mereka secara layak. (Santoso et al., 2024)

Menurut Todaro dalam (Augustpaosa Nariman, 2019) ada tiga komponen utama pembangunan manusia sebagai berikut :

1. Kecukupan merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara fisik, yang mencakup pangan, kesehatan, pangan, sandang, dan keamanan. Kebutuhan dasar ini sangat penting, hal ini dikarenakan jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak tercukupi, maka dapat mengakibatkan ketertinggalan yang mengancam kelangsungan hidup seseorang.
2. Jati diri merupakan elemen penting pada kehidupan yang lebih baik, yang mencakup motivasi dari dalam diri untuk terus berkembang, percaya diri, serta merasa berhak dan layak untuk mencapai tujuan hidup. Semua hal ini tercermin dalam konsep self-esteem, yang menjadi dasar dari pembentukan kepercayaan dan harga diri seseorang
3. Kebebasan dari sikap menyerah, merujuk pada keinginan untuk mempunyai nilai-nilai umum dalam pembangunan manusia, yang mencakup kemerdekaan sejati. Kemandirian dan kebebasan ini dimaknai sebagai keahlian untuk berdiri tegak tanpa diperbudak oleh pengejaran materialisme dalam hidup. Dengan kebebasan ini, kita tidak hanya menjadi pihak yang dipilih, tetapi kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan sendiri dalam menjalani hidup.

2.1.3 Tingkat Pengangguran

Pengangguran merujuk pada individu yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, sedang merencanakan usaha baru, telah diterima bekerja atau siap berusaha namun belum memulai pekerjaan atau usahanya, atau mereka yang merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan telah kehilangan harapan. (Statistik, 2024). Pengangguran ialah individu yang diklasifikasikan pada angkatan kerja, yaitu mereka yang aktif mencari pekerjaan dengan harapan memperoleh pekerjaan sesuai dengan harapan gaji, tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Pengangguran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti pengangguran friksional, di mana individu memilih untuk tidak bekerja sementara waktu dengan tujuan mencari pekerjaan yang lebih sesuai atau lebih baik; pengangguran struktural, yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara keterampilan atau kualifikasi pencari kerja dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia; dan pengangguran siklis, yang timbul akibat fluktuasi ekonomi, di mana permintaan tenaga kerja berkurang karena ketidakstabilan ekonomi. Perlu ditekankan bahwa pengangguran berbeda dengan sekadar tidak bekerja. Seseorang tidak dapat dianggap pengangguran hanya karena tidak memiliki pekerjaan, melainkan hanya jika mereka aktif mencari pekerjaan, berusaha mendapatkan pekerjaan, dan tidak berhasil. Dalam ilmu kependudukan atau demografi, individu yang termasuk dalam kategori ini masuk dalam kelompok angkatan kerja, yaitu bagian dari penduduk yang berusia produktif dan siap bekerja. (Himo et al., 2022). Pengangguran bisa diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pekerja yang tersedia dengan peluang kerja yang ada, serta oleh keterbatasan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, yang sering kali mengarah pada masalah *underemployment* atau pekerja yang terpaksa mendapatkan pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan upah yang di bawah yang seharusnya. (Bakar & Faisal, 2022).

Tingkat pengangguran salah satu indikator yang utama dalam menilai kesuksesan pembangunan ekonomi, karena angka pengangguran mencerminkan sejauh mana pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja,

bilamana tidak diselarasi dengan peningkatan peluang kerja, jumlah pengangguran akan cenderung meningkat. Angkatan kerja dan tingkat pengangguran mencerminkan seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya dinamika pembangunan yang dapat menyerap seluruh angkatan kerja, karena tanpa adanya keseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja, kondisi ini justru dapat membebani ekonomi. Di era modern, pendidikan dianggap menjadi sarana dalam menambah kesejahteraan, khususnya dalam memanfaatkan peluang kerja. Pendidikan juga mencerminkan tingkat kecerdasan dan keberhasilan pendidikan formal, di mana kian tingginya tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula potensi kerja dan produktivitasnya, karena tujuan utama pendidikan adalah untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Pengangguran pada suatu perekonomian disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (Anwar, 2023) :

1. Proses mencari kerja

Proses ini menjelaskan pandangan penting mengenai tingkat pengangguran. Masuknya angkatan kerja baru meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan. Berbagai hambatan muncul dalam pencarian pekerjaan, seperti keinginan pekerja untuk beralih ke pekerjaan lain dan ketidaksempurnaan informasi yang didapatkan oleh pencari kerja tentang lowongan yang tersedia, serta ketidakjelasan mengenai besaran upah yang layak diterima. Selain itu, faktor-faktor lain seperti kurangnya kesesuaian keterampilan dengan pekerjaan yang dibutuhkan juga turut mempengaruhi proses pencarian kerja.

2. Kekakuan upah

Tingginya tingkat pengangguran ditentukan oleh kekakuan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Penurunan dalam proses pengolahan perekonomian yang akan membuat berkurangnya harapan terhadap tenaga kerja, yang pada gilirannya nantinya memperkecil besaran upah yang ditawarkan. Ketika upah tidak fleksibel, dalam waktu dekat, upah akan menghadapi stagnasi atau bahkan penurunan dari tingkat semula. Kekakuan upah ini akan

menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja, yang berujung pada inflasi pengangguran karena ketidaksesuaian antara upah yang diinginkan dan yang dapat diberikan oleh pasar.

3. Efisiensi upah

Efisiensi dalam teori pengupahan juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Efisiensi yang tercipta dari tingkat upah yang besar akan mendorong pekerja agar bekerja lebih keras, meskipun pada titik tertentu akan terjadi penurunan produktivitas (*diminishing rate*). Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif jika perusahaan menentukan untuk membayar lebih kepada tenaga kerja yang mempunyai efisiensi lebih besar, karena akan menyebabkan persaingan yang ketat di pasar kerja dan mengarah pada pengangguran terpaksa.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukirno (1996) menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mempunyai makna yang tidak sama. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi per individu yang berlangsung terus-menerus pada jangka panjang, yang menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pembangunan. Dengan kata lain, semakin pesat laju pertumbuhan ekonomi, umumnya akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun ada faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti distribusi pendapatan. (Huda et al., 2021)

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan berfungsi menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kesuksesan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran krusial dalam merumuskan tujuan pembangunan masa depan, serta menjadi isu penting yang dihadapi banyak negara. Proses pertumbuhan ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal tersebut mencerminkan kemajuan dalam sektor-sektor ekonomi, sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi menandakan melemahnya aktivitas ekonomi. Setiap negara, baik yang maju ataupun berkembang, selalu menargetkan pertumbuhan ekonomi

yang baik sebagai tujuan utama, karena pertumbuhan yang stabil dapat mendorong investasi, meningkatkan modal, dan membuka lebih banyak peluang kerja di negara tersebut. (Astuti & Wijaya, 2024)

Dalam bidang ekonomi, ada berbagai teori pertumbuhan ekonomi yang memiliki perbedaan pendapat. Setiap ekonom dapat memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan proses pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemaparan Sadono Sukirno (2015), teori-teori pertumbuhan ekonomi ini bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dapat menurun dalam pertumbuhan ekonomi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya biaya produksi atau upah pekerja. Konsep ini pertama kali dikembangkan pada abad ke-17 oleh pemikir-pemikir seperti Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith mempunyai pandangan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui spesialisasi dan pembagian kerja, sementara David Ricardo menekankan pentingnya perdagangan internasional sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik juga menyoroti peran pasar bebas dan persaingan, yang dianggap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter fokus pada fungsi utama perubahan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Schumpeter mengemukakan bahwa inovasi adalah faktor utama yang mendorong perkembangan ekonomi. Ia berpendapat bahwa pengusaha yang siap mengambil risiko dengan memperkenalkan produk, proses, atau pasar baru akan memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, inovasi merupakan kekuatan esensial yang mendasari pertumbuhan jangka panjang dalam sistem kapitalisme.

2. Teori Harrod-Domar

Pandangan ini menekankan urgensi keseimbangan antara tingkat investasi dan tingkat tabungan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*). Berdasarkan pandangan ini, jika investasi lebih rendah dari

tabungan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila investasi melebihi tabungan, hal tersebut dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi, Harrod-Domar menyarankan supaya pemerintah fokus pada peningkatan investasi, terutama di sektor-sektor yang produktif, untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Berdasarkan teori ini, investasi memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada akumulasi modal (investasi), inovasi teknologi, dan perkembangan tenaga kerja. Model Solow-Swan, yang menggambarkan teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, menyoroti pentingnya interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, inovasi teknologi, dan hasil produksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pandangan ini juga menekankan hubungan antara kemajuan ekonomi nasional dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. (Astuti & Wijaya, 2024).

2.1.5 Upah Minimum

Berdasarkan teori ekonomi, upah merujuk pada kompensasi yang dibagikan kepada pekerja sebagai imbalan atas usaha fisik ataupun intelektual yang mereka lakukan kepada perusahaan. Jumlah upah yang ditentukan merupakan kompensasi atas jasa yang sudah disediakan oleh para pekerja, yang berlaku dalam waktu atau ketentuan tertentu. (Sutama et al., 2019). Perkembangan tingkat upah akan berdampak pada perubahan biaya produksi perusahaan. Bilamana diasumsikan bahwasanya tingkat upah mengalami kenaikan, alhasil beberapa hal seperti ini akan terjadi:

1. Kenaikan upah menambah biaya produksi, yang mengarah pada harga barang yang lebih tinggi. Konsumen cenderung mengurangi pembelian, menyebabkan barang tidak terjual dan produsen memperkecil angka produksi. Penurunan target produksi ini mengarah pada berkurangnya

kebutuhan tenaga kerja, yang dikenal sebagai efek skala produksi.(*scale effect*)

2. Kenaikan upah (dengan harga barang modal tetap) mendorong pengusaha menggunakan teknologi lebih padat modal, menggantikan tenaga kerja dengan mesin, yang memperkecil kebutuhan tenaga kerja, dikenal sebagai efek substitusi tenaga kerja(*substitution effect*)

Menurut UU No. 13 tahun 2003, upah minimum hanya diperuntukkan bagi pekerja yang bermasa kerja antara 0 (nol) hingga 1 (satu) tahun. Dalam pengertian tersebut, adapun dua aspek utama yang terkait dengan upah minimum, diantaranya:

1. Upah permulaan merujuk pada upah terkecil yang wajib didapatkan oleh pekerja saat pertama kali diterima untuk bekerja.
2. Jumlah upah minimum harus cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup pekerja, yaitu kebutuhan primer secara minimal.

Simanjuntak (2002) pada tulisannya yang berjudul “Masalah Upah dan Jaminan Sosial” mengungkapkan bahwasanya pihak berwenang menetapkan upah minimum diperbarui setiap tahun atau dua tahun sekali pada setiap provinsi atau wilayah kabupaten yang saling berdekatan. Penentuan upah minimum bertujuan untuk:

1. Tujuan penetapan upah minimum yaitu agar terhindar dan untuk menurunkan persaingan tidak sehat di antara pekerja dalam keadaan pasar yang berlebihan, yang dapat membantu mereka mendapatkan upah yang lebih rendah dari tingkat kelayakan.
2. Untuk menghindari atau menurunkan potensi pemanfaatan buruh oleh perusahaan yang menggunakan keadaan pasar kerja demi mengakumulasi keuntungan.
3. Menghasilkan ikatan industrial yang lebih baik dan seimbang.
4. Agar kemiskinan di kalangan pekerja dapat ditekan, penting untuk menyesuaikan upah minimum dengan kebutuhan dasar pekerja serta tanggungan keluarganya.
5. Meningkatkan kapasitas konsumsi masyarakat, yang bertujuan membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2013, upah minimum dipengaruhi oleh KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi, dengan tujuan mencapai KHL yang sesuai. Bersales (2014) menambahkan bahwa faktor lain juga berperan pada penetapan upah minimum, di antaranya:

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni indikator yang menetapkan total biaya barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK dipergunakan dalam mengevaluasi perkembangan biaya hidup dan menentukan seberapa besar peningkatan penghasilan yang diperlukan untuk mempertahankan ukuran hidup yang stabil.
2. Angkatan kerja (*labor force*) merujuk pada jumlah Orang yang saat ini menjalankan pekerjaan serta mereka yang tengah berusaha mendapatkan pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang umum dipakai untuk menganalisis sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total pasar dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Dalam praktiknya, PDRB tidak hanya dipergunakan dalam menetapkan jumlah output yang dihasilkan, tetapi juga berfungsi sebagai indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
4. Pendapatan per kapita mengacu pada rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara pada jangka waktu tertentu. Kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan melalui peningkatan pendapatan per kapita, yang dihitung menggunakan harga tetap atau pendapatan riil. (Sutama et al., 2019).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai indikator utama pembangunan sebuah wilayah dan seharusnya mempunyai korelasi positif dengan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Diharapkan bahwa wilayah dengan nilai IPM yang tinggi juga mempunyai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, sehingga bisa disimpulkan bilamana semakin tinggi nilai IPM, maka tingkat kemiskinan

seharusnya semakin rendah. (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018). Tingkat kemiskinan menggambarkan ukuran penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang sering kali berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara umum, ada kaitan erat antara IPM dan tingkat kemiskinan. Meningkatkan IPM melalui program-program sosial dan ekonomi dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan, sementara upaya untuk mengatasi kemiskinan juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.2.2. Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi suatu daerah. Jadi, diperlukan kebijakan pemerintah yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran. Jika jumlah pengangguran terus meningkat, hal ini dapat menyebabkan kemunduran ekonomi yang berdampak negatif bilamana tidak diatasi dengan baik. Pada jangka panjang, keadaan ini dapat memperburuk kemiskinan, karena pengangguran yang tidak memiliki penghasilan tetap cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah ini, solusi seperti pembukaan lapangan pekerjaan yang fokus pada penciptaan kerja dan peningkatan keterampilan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara bersamaan. (Ii & Infaq, 2019).

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk mengukur kemiskinan, karena perubahan ekonomi memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Provinsi menggunakannya untuk menilai kemajuan ekonomi, yang berpotensi mengurangi kemiskinan jika dianalisis dengan tepat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan aktivitas ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan. Jika pendapatan ini merata, kemiskinan dapat berkurang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ii & Infaq, 2019).

2.2.4 Upah Minimum dengan Tingkat Kemiskinan

Pada penelitian (Ekonomi et al., 2021) menunjukkan bahwa upah minimum mempengaruhi negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan terbalik antara upah minimum dan angka kemiskinan, di mana upah

minimum berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Jika upah minimum dinaikkan, jumlah keluarga miskin diprediksi akan berkurang. Namun, hubungan antara upah minimum dan kemiskinan sangat kompleks dan ditentukan oleh beragam faktor lainnya. Peningkatan upah minimum dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, tetapi keberhasilannya tergantung pada konteks ekonomi lokal dan kebijakan pendukung lainnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam dan untuk membuat strategi yang lebih optimal dalam pengurangan angka kemiskinan.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Studi mengenai tema ini telah dilakukan beberapa kali, termasuk oleh peneliti terdahulu, dengan kesimpulan yang dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018)	“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada 6” Provinsi di Pulau Jawa)	Penelitian ini menerapkan regresi berganda dengan data panel melalui Eviews 9 dalam menganalisis pengaruh variabel independen pada kemiskinan.	Hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi langsung oleh IPM secara negatif, serta dipengaruhi tidak langsung oleh tingkat pengangguran terbuka secara negatif, dan pertumbuhan ekonomi serta upah minimum provinsi secara positif.
2	(Muhammad Lukman k. et al., 2013)	“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2007 -	Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan data panel, serta uji Chow, Hausman, dan asumsi klasik untuk menentukan model.	Hasilnya memperlihatkan bahwasanya kemiskinan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi, sementara inflasi tidak membawa dampak signifikan pada kemiskinan di 6

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		2013 (Studi Kasus Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa)”		provinsi di Pulau Jawa..
3	(Utami et al., 2022)	“Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021”	Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan data dari BPS Indonesia.	Temuannya memperlihatkan bahwasanya pengangguran tidak membawa dampak signifikan pada kemiskinan di Provinsi Banten, dan penurunan pengangguran belum tentu mengurangi kemiskinan.
4	(Edna Safitri et al., 2022)	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten”	Penelitian ini mempergunakan regresi data panel dengan Eviews 10 dan tingkat signifikansi 5%, memilih model Fixed Effect Model (FEM).	Hasilnya memperlihatkan bahwasanya subsidi pemerintah dan PDRB membawa dampak signifikan pada kemiskinan di Provinsi Banten, sementara IPM tidak membawa dampak signifikan.
5	(NToolkit et al., 2010)	“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara”	Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji dampak pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan di Sumatera Utara.	Hasilnya memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi membawa dampak negatif dan signifikan pada kemiskinan.
6	(Himo et al., 2022)	“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019”	Penelitian ini mempergunakan data panel sekunder dengan analisis regresi berganda melalui Eviews 9 dan metode fixed effect model.	Temuannya memperlihatkan beberapa variabel independen membawa dampak signifikan, sementara lainnya tidak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	(Prakoso, 2020)	“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2010-2019”	Analisis data menggunakan regresi panel dengan Eviews menunjukkan bahwasanya dengan simultan, keempat variabel bebas berpengaruh signifikan.	Secara parsial, Tingkat Pendidikan, Inflasi, dan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan, sementara Investasi Asing tidak berpengaruh signifikan pada tingkat pengangguran di Indonesia (2010-2019).
8	(Faadihilah & Wiwin Priana Primadha, 2023)	“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi”	Pendekatan analisis yang diterapkan yakni regresi linier berganda.	Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan IPM tidak membawa dampak signifikan pada kemiskinan, sementara upah minimum di tingkat kabupaten terbukti membawa dampak signifikan pada tingkat kemiskinan.
9	(Sutama et al., 2019)	“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017”	Penelitian ini bersifat asosiatif dengan data kuantitatif sekunder.	Temuannya memperlihatkan bahwasanya tidak ditemukan dampak signifikan antara PDRB dan TPAK pada Upah Minimum Kabupaten Sumbawa periode 2013-2017.
10	(Kusumo, 2019)	“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan	Penelitian ini menerapkan regresi data panel periode 2013-2019.	Temuannya memperlihatkan pengangguran, pendidikan, dan upah minimum membawa dampak signifikan,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019”		sementara pertumbuhan ekonomi tidak signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.
11	(Hidayah, 2024)	“Analisis Dampak Pendidikan, Perumahan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Se Jawa Timur”	Penelitian ini menerapkan regresi linier berganda.	Temuannya memperlihatkan bahwasanya variabel pendidikan, perumahan, dan pengangguran membawa dampak signifikan pada kemiskinan, baik secara individu maupun simultan, di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
12	(Sari, 2022)	“Analisi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2021”	Penelitian ini mempergunakan data time series dari 2010 hingga 2021 dan menganalisisnya dengan regresi linier berganda.	Temuannya memperlihatkan bahwasanya dengan simultan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum membawa dampak signifikan pada kemiskinan. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak membawa pengaruh, sementara pengangguran dan upah minimum membawa dampak signifikan pada kemiskinan.
13	(Suherman et al., 2022)	“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan	Penelitian ini menggunakan data time series dari 2010 hingga 2021 dan	Hasilnya memperlihatkan bahwasanya secara simultan, IPM,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi”	menganalisisnya dengan regresi linier berganda.	pertumbuhan penduduk, dan tingkat pengangguran membawa dampak signifikan pada kemiskinan (Prob (F-statistic) = 0,00001). Secara parsial, indeks pembangunan manusia membawa dampak positif dan signifikan pada kemiskinan di Provinsi Jambi.
14	(Kiray et al., 2023)	“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara”	Penelitian ini mempergunakan data sekunder time series dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara, yang dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan Eviews 8.	Temuannya memperlihatkan bahwasanya produk domestik regional bruto membawa dampak positif signifikan pada kemiskinan, sementara indeks pembangunan manusia membawa dampak negatif signifikan pada kemiskinan. Secara simultan, keduanya membawa dampak signifikan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara.
15		“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Kediri”	Metode analisis data yang dipilih pada penelitian ini yakni analisis regresi sederhana, koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.	Temuan analisis regresi memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif dengan kemiskinan di Kabupaten Kediri, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mengurangi tingkat kemiskinan.
16	(Amara & Jemmali, 2018)	“Household and Contextual Indicators of Poverty in Tunisia: A Multilevel Analysis”	Makalah ini menggunakan model logit bertingkat dan model linier campuran bertingkat untuk menganalisis secara bersamaan faktor-faktor tingkat mikro (rumah tangga) dan tingkat makro (kegubernuran) yang mungkin memengaruhi sifat dan pola sosial kemiskinan di Tunisia.	Penelitian ini menemukan bukti yang meyakinkan bahwa kemungkinan rumah tangga menjadi miskin berhubungan positif dan signifikan dengan ukuran rumah tangga, jumlah anak per keluarga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Analisis tingkat makro menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lingkungan yang lebih tinggi dikaitkan dengan peluang kemiskinan yang lebih tinggi, sementara aglomerasi industri dan keseimbangan migrasi yang lebih besar dikaitkan dengan peluang kemiskinan yang lebih rendah.
17	(Nandori, 2010)	“The effect of economic growth on poverty in Eastern Europe”	Untuk menguji hipotesis penulis, penulis melakukan analisis regresi dan menggunakan data dari survey rumah tangga dan akun nasional.	Hasilnya memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi membawa dampak signifikan pada kemiskinan, tetapi tidak pada ketimpangan pendapatan sejak tahun 1990. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat membantu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mengurangi tingkat dan kedalaman kemiskinan. Namun, pembangunan manusia tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan.
18	(Tang et al., 2023)	“Spatial distribution pattern and influencing factors of relative poverty in rural China”	Penelitian ini menghitung tingkat kemiskinan relatif daerah pedesaan di Tiongkok dengan menggunakan perangkat lunak POVCAL dari Bank Dunia menurut data pengelompokan pendapatan dan menganalisis karakteristik pola spasial dan temporal.	Hasil penelitian ini menyatakan tingkat kemiskinan relatif di pedesaan Tiongkok meningkat secara keseluruhan, dan ada karakteristik ketergantungan spasial tertentu. Diferensiasi pendidikan dan kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan memiliki efek yang memperburuk kemiskinan relatif pedesaan, sementara tingkat medis pedesaan, tingkat jaminan sosial pedesaan, dan segmentasi perkotaan-pedesaan dapat mengurangi kemiskinan relatif pedesaan.
19	(Legitaria, 2023)	“Poverty: Minimum Wage, Human Development Index, and Unemployment in Asean-8”	Penelitian ini mempergunakan data sekunder dari Bank Dunia dan UNDP tahun 2011-2020, serta mengaplikasikan regresi data panel dengan	Penelitian ini menemukan bahwasanya upah minimum membawa dampak negatif signifikan pada kemiskinan, sementara

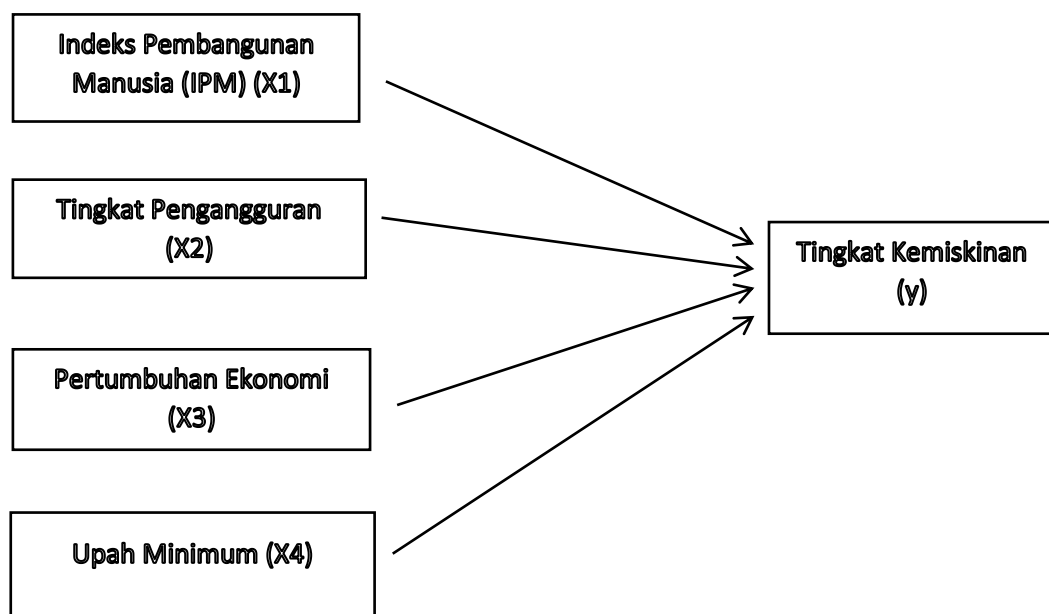
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			model Random Effect (REM).	indeks pembangunan manusia dan pengangguran membawa dampak positif tetapi tidak signifikan di ASEAN-8.
20	(Koiry et al., 2024)	“Impact of income diversification on multidimensional poverty: Household level evidence from tea estates in Bangladesh”	Prosedur pengambilan sampel multistage diterapkan untuk memilih 1 perkebunan teh dan 382 rumah tangga. Data primer dikumpulkan melalui jadwal wawancara. Indeks diversifikasi Simpson dan indeks kemiskinan multidimensi Alkire-Foster digunakan untuk mengukur diversifikasi pendapatan dan kemiskinan multidimensi masing-masing.	Temuan ini mengungkapkan bahwa area penelitian memiliki keragaman pendapatan tingkat rumah tangga sebesar 35%, tingkat kemiskinan multidimensi tingkat rumah tangga sebesar 43%, dan diversifikasi pendapatan memiliki dampak positif pada pengurangan kemiskinan multidimensi. Kemiskinan multidimensi berkurang rata-rata sebesar 0,095% untuk rumah tangga yang memiliki diversifikasi pendapatan. Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan, diversifikasi pendapatan dapat menjadi solusi yang baik untuk mengurangi kemiskinan multidimensi di tingkat rumah tangga.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu rangkaian hubungan atau hubungan antara konsep-konsep yang saling berhubungan dalam suatu permasalahan yang

akan diteliti. Tujuan dari kerangka pemikiran yaitu untuk menghubungkan dan menjelaskan secara rinci topik yang akan dikaji pada penelitian tersebut.

Berdasarkan teori yang mendasari, serta referensi dari penelitian sebelumnya dan diskusi tentang hubungan antara variabel independen, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum, pada variabel dependen, yaitu Tingkat Kemiskinan, kerangka konseptual penelitian ini disajikan seperti berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan sementara yang diajukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah, yang kemudian akan diuji kebenarannya menggunakan metode ilmiah. Karena belum didasarkan pada data empiris, hipotesis ini disebut sebagai dugaan awal yang hanya mengandalkan teori-teori yang relevan. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara yang bersifat teoretis sebelum dikonfirmasi secara empiris. Dalam penelitian ini, hipotesis akan disusun untuk menyediakan arah dan pedoman pada proses penelitian yakni:

“Diduga Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang dipergunakan yakni data sekunder berbentuk data panel. Data sekunder ialah informasi yang disusun dari sumber yang tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian, atau berasal dari lembaga yang terkait dengan topik yang diteliti. Data tersebut sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. (Sugiyono, 2017). Data Panel yaitu data yang mencakup data *time series* (runtun waktu) beserta data *cross section* (data silang) (Ramadhan, 2022). Data panel pada penelitian ini yakni tersusun atas data *time series* (runtun waktu) periode tahun 2015-2024 beserta data *cross section* (data silang) diambil dari 5 provinsi pulau sumatera bagian selatan, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Kep. Bangka Belitung.

Sumber data mengacu pada segala hal yang dapat menjadi dasar dan menyediakan informasi terkait data tersebut. Berdasarkan asal dan cara perolehannya, sumber data diklasifikasikan atas dua kategori, mencakup data primer dan data sekunder. Penelitian ini menerapkan data sekunder, yaitu data yang dihasilkan secara tidak langsung dari sumber aslinya. Umumnya, data sekunder dikumpulkan oleh berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan informasi dan kemudian disebarluaskan untuk keperluan publik. Pada studi ini, sumber data yang dimanfaatkan mencakup Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, BPS dari provinsi yang relevan, serta berbagai badan pemerintahan lainnya.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis yang diimplementasikan pada penelitian ini meliputi pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif berfungsi dalam memberi deskripsi atas data yang telah terkumpul. Sementara itu, penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang terstruktur, terencana, dan sistematis, di mana data yang dipilih berbentuk angka yang mampu diukur. Penelitian kuantitatif berfokus pada penyusunan dan analisis data berbentuk numerik (Ali et al., 2022).

3.2.1 Deskriptif Kuantitatif

Metode analisis ini dipilih dalam menjawab tujuan pertama, yakni “perkembangan IPM, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan dimasing-masing Provinsi dipulau Sumatera bagian selatan tahun 2015-2024.” Perhitungan perkembangan secara umum dipilih rumus berikut:

$$P_i = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

- P = Perkembangan
- i = Y, X1, X2, X3, X4
- Y = Tingkat Kemiskinan
- X1 = Indeks Pembangunan Manusia
- X2 = Tingkat Pengangguran
- X3 = Pertumbuhan Ekonomi
- X4 = Upah Minimum
- t = Tahun Berlalu
- t-1 = Tahun sebelumnya

3.2.2 Metode Regresi Data Panel

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu “pengaruh tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera bagian selatan tahun 2015-2024” melalui persamaan regresi data panel.

Pada penelitian ini, persamaan regresi data panel yakni seperti berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 PE + \beta_4 UM + e_{it} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan:

- TK : Tingkat Kemiskinan
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien Regresi

IPM	: Indek Pembangunan Manusia
TP	: Tingkat Pengangguran
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
UM	: Upah Minimum
i	: Menunjukkan Provinsi
t	: Menunjukkan Deret Waktu dari 2015-2024
e	: <i>Error</i>

3.3 Estimasi Regresi Data Panel

Adapun tiga metode yang dapat dipergunakan dalam menetapkan model regresi data panel, antara lain:

3.3.1 *Common Effect Model (CEM)*

Ini ialah pendekatan model data panel yang paling dasar, hal tersebut disebabkan model ini menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Penggabungan kedua jenis data tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan perbedaan waktu dan individu, alhasil metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dapat diterapkan dalam mengestimasi model data panel.

3.3.2 *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini memperkirakan bahwasanya perbedaan antar individu mampu dijelaskan melalui perbedaan intersepnya. Dalam model data panel dengan efek tetap, estimasi dilakukan melalui teknik variabel dummy guna mengidentifikasi perbedaan intersep antar wilayah, sementara intersep antar waktu dianggap tetap. Pendekatan estimasi ini dikenal dengan sebutan *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

3.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Model memperkirakan Standard Error dapat berkorelasi dari waktu ke waktu dan lintas wilayah. Dalam REM, perbedaan intersep disesuaikan dengan kesalahan standar untuk setiap wilayah. Pendekatan ini memiliki manfaat untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk memperkirakan model data panel, gunakan *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Squares* (GLS).

3.4 Uji Penentuan Model

Dalam menetapkan model yang paling tepat pada analisis data panel, adapun pengujian yang harus dijalankan, yaitu:

3.4.1 Uji Chow atau Chow Test

Uji Chow digunakan guna menilai model yang paling sesuai dalam menganalisis data panel, antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM). Bilamana nilai probabilitas chi-square untuk *cross-section* melebihi 1%, maka CEM dipilih, tetapi jika kurang dari 1%, maka FEM yang dipilih.

3.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman bermaksud guna membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) guna menentukan model yang paling tepat pada regresi data panel. Bilamana nilai probabilitas dari Cross-section Random lebih besar dari 1%, alhasil REM dipilih, namun jika lebih kecil dari 1%, maka FEM dipilih.

3.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan guna mengevaluasi apakah *Common Effect Model* (CEM) lebih baik daripada *Random Effect Model* (REM). Pada aplikasi Eviews, pengujian ini dilihat melalui nilai Breusch Pagan. Bilamana probabilitas uji melebihi 1%, CEM adalah model yang dipilih, sementara jika lebih kecil, REM yang dipilih.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menjadi sebuah pengujian sebelum pengujian hipotesis yang dijalankan menjadi prasyarat dalam analisis regresi data panel. Pengujian ini juga dijalankan guna melihat probabilitas adanya permasalahan pada analisis regresi yang cukup besar ada ketika menyesuaikan model prediksi kedalam model yang telah dimasukan pada sebuah rangkaian data.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ialah pengujian yang mengevaluasi data-data yang ada terkait pendistribusian data yang normal ataupun terdapat pengganggu pada regresi panel. Uji ini akan dianalisis menggunakan program aplikasi Eviews 12.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Uji ini menguji korelasi antar faktor pengganggu dengan faktor pengganggu lainnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan nilai Durbin Watson. Namun pada penelitian ini, tidak menggunakan uji ini karena pengujian ini dikhususkan untuk data rentang waktu sehingga pengujian autokorelasi pada data yang bukan rentang waktu tidaklah memiliki arti.

3.5.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan dalam mengevaluasi hubungan linear kuat hingga sempurna pada variabel bebas. Oleh karena itu, dapat menjadi sulit untuk memisahkan pengaruh tiap variabel bebas dan terikat. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan adanya korelasi antara variabel bebas pada persamaan regresi.

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Metode pemeriksaan heteroskedastisitas dipergunakan dalam menentukan apakah ditemukan perbedaan pada variasi gangguan antara pengamatan pada model. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada variasi dan residual yang berbeda di antara pengamatan regresi. Bilamana variasi dan residual tetap sama antar pengamatan, itu disebut homoskedastisitas. Bilamana variasi dan residual tidak tetap sama, itu disebut heteroskedastisitas. Dalam pemeriksaan heteroskedastisitas, hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas tiap variable:

Ho diterima jika nilai probabilitas t-stastistic tiap variable bebas melebihi taraf signifikan 0,01 ($\text{Prob} > 0.01$).

Ha ditolak jika nilai probabilitas t-stastistic tiap variable bebas di bawah dari taraf signifikan 0,01 ($\text{Prob} < 0.01$)

3.6 Uji Statistik

Uji statistik mengevaluasi kontribusi variabel bebas pada variabel terikat secara parsial dan simultan. Uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) dijalankan melalui signifikansi nilai F pada alpha 0,01 (1%). Dalam menemukan seberapa besar variasi yang dapat disebabkan oleh variabel bebas, nilai R^2 digunakan.

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dijalankan dengan rumus dan hipotesis berikut:

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_{01}}{\text{Sec}(\beta_1)} \dots \dots \dots (3.3)$$

Keterangan:

- t = Nilai uji t
 β = Koefisien regresi
Se = Standar error dari koefisien regresi

Hipotesis:

- Bilamana nilai Signifikan di bawah 0,01 (1%), hal tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel bebas membawa dampak tertentu pada variabel yang diteliti (variabel terikat)
- Bilamana nilai Signifikan melebihi 0,01 (1%), yang mempunyai artian variabel bebas tidak membawa dampak secara parsial pada variabel yang diteliti (variabel terikat)

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Hipotesis untuk analisis ini dirumuskan seperti berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(N-k)} \dots\dots\dots(3.4)$$

Keterangan:

- F = Nilai uji F
R = Koefisien determinasi
k = Jumlah variabel independen
N = Jumlah sampel

Hipotesis:

- Ho : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$ (variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)
H : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ (variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat)

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R Square ialah metrik yang menghitung dampak dari variabel independen pada variabel dependen, dengan rentang nilai mulai dari 0 hingga 1. Nilai yang di bawah 0 menandakan kontribusi yang paling sedikit dari variabel bebas pada variabel terikat, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel bebas pada variabel terikat.

Berikut persamaan yang dipergunakan dalam menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$r^2 = \frac{SSR}{SST} \dots\dots\dots(3.5)$$

Keterangan:

r^2 = Koefisien Determinasi

SSR = Jumlah kuadrat residual

SST = Jumlah kuadrat total

3.7 Definisi Operasional Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dikenal juga dengan *Human Development Index* (HDI), yakni suatu ukuran yang dipergunakan dalam menilai tingkat keberhasilan pada peningkatan kualitas hidup manusia, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penilaian ini dilakukan berdasarkan data dari Provinsi Sumatera Bagian Selatan selama periode 2015-2024 dalam bentuk indeks.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni persentase dari jumlah individu yang tidak memiliki pekerjaan namun sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024 dalam bentuk persen.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan ukuran ekonomi suatu wilayah pada jangka panjang, yang dinilai melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2015-2024 dalam bentuk persen.
4. Upah minimum adalah jumlah terendah yang secara hukum diizinkan untuk dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerja untuk pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu yang dilihat dari UMP Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024 dalam satuan rupiah.
5. Tingkat kemiskinan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk miskin, yakni tingkat penghasilan minimum yang dibutuhkan dalam mencapai kebutuhan dasar sebagai contohnya tempat tinggal, makanan, dan

kebutuhan sehari-hari lainnya di Provinsi Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024 dengan bentuk persen.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Luas Wilayah Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Sumatera Bagian Selatan adalah wilayah yang meliputi provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Wilayah ini terletak di bagian selatan Pulau Sumatra dan dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah selatan, serta Selat Sunda di barat daya, yang menjadi penghubung dengan Pulau Jawa. Letak geografisnya yang berada di sepanjang pantai dan juga memiliki pegunungan, menjadikan daerah ini kaya akan potensi alam. Setiap provinsi memiliki kondisi geografis yang sangat beragam mulai dari dataran rendah. Pegunungan, hutan tropis yang lebat serta garis pantai yang panjang dan indah. Sumatera Selatan dikenal dengan sungai-sungai besar seperti Sungai Musi yang menjadi tempat transportasi dan perdagangan, Provinsi Lampung yang memiliki dataran tinggi dan pesisir yang subur serta ideal untuk pertanian dan perkebunan. Provinsi Jambi yang memiliki luas hutan tropis di Taman Nasional Kerinci Seblat. Provinsi Bengkulu dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dan memiliki pantai yang eksotis Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan pulau-pulau kecil yang menarik wisatawan.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2024

No	Provinsi	Ibu Kota	Luas (km ²)	Rasio Luas
1	Jambi	Jambi	49.026,58	23,28
2	Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	43,45
3	Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	9,44
4	Lampung	Bandar Lampung	33.570,26	15,92
5	Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.690,13	7,92
Sumatera Bagian Selatan			210.798,73	100

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Tabel 4.1 menunjukkan data jumlah provinsi, ibu kota, luas wilayah, dan rasio wilayah di Sumatera Bagian Selatan. Provinsi dengan luas wilayah terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 91.592,43 km². Provinsi terbesar kedua adalah Provinsi Jambi dengan luas 49.026,58 km². Provinsi terbesar ketiga adalah Provinsi Lampung dengan luas 33.570,13 km². Lalu, Provinsi Bengkulu

dengan luas 19.919,33 km². Dan Provinsi dengan luas terkecil adalah Kep. Bangka Belitung dengan luas 16.690,13 km². Luas wilayah Sumatera Bagian Selatan adalah 210.798,73 km².

4.2 Kondisi Demografi Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan

Berdasarkan data BPS terbaru, jumlah penduduk di kawasan ini mencapai 20 juta jiwa dengan konsentrasi terbesar berada di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Struktur umur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai lebih dari 65 persen dari total penduduk, menandakan potensi bonus demografi yang besar. Namun demikian, distribusi penduduknya masih belum merata karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan daerah pesisir, sedangkan daerah pedalaman memiliki kepadatan yang relatif rendah. Selain itu, tingkat urbanisasi di wilayah ini terus meningkat yang berdampak pada bertambahnya beban kota-kota besar seperti Palembang dan Bandar Lampung. Dengan kondisi tersebut, Sumatera Bagian Selatan memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan struktur penduduk usia produktifnya, namun tetap perlu mengantisipasi permasalahan distribusi penduduk, urbanisasi, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	3.667.894	3.585.119	3.631.100	3.760.275	3.795.579	3.687.993
Perkembangan %		-2,25	1,28	3,55	0,93	0,66
Sumatera Selatan	8.600.765	8.550.849	8.657.008	8.743.522	8.837.301	8.677.889
Perkembangan %		-0,58	1,24	0,99	1,07	0,68
Bengkulu	2.010.670	2.032.942	2.060.092	2.086.883	2.115.024	2.061.122
Perkembangan %		1,10	1,33	1,30	1,34	1,26
Lampung	8.521.201	9.081.792	9.175.546	9.269.110	9.462.858	9.102.101
Perkembangan %		6,67	1,03	1,01	2,09	2,7
Kep. Bangka Belitung	1.445.678	1.473.165	1.494.621	1.511.899	1.531.530	1.495.932
Perkembangan %		0,01	1,45	1,15	1,29	0,97
Sumbagsel	24.246.208	23.250.702	25.018.367	25.371.689	25.742.292	24.725.852

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Tabel 4.2 menyajikan data perkembangan jumlah penduduk setiap Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2020-2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jambi tercatat pada angka 3.667.894 jiwa. Tahun 2021 jumlah penduduk menurun sebesar -2,25 persen dengan jumlah penduduk pada angka 3.585.119 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,28 persen dengan jumlah penduduk pada angka 3.631.100 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebesar 3,55 persen dengan jumlah penduduk pada angka 3.760.275 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen dengan jumlah penduduk pada angka 3.795.579 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah 3.678.993 jiwa. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dari lima provinsi sumbagsel.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tercatat pada angka 8.600.765 jiwa. Tahun 2021 jumlah penduduk menurun sebesar -0,58 persen dengan jumlah penduduk pada angka 8.550.849 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,24 persen dengan jumlah penduduk pada angka 8.657.008 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebesar 0,99 persen dengan jumlah penduduk pada angka 8.743.522 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen dengan jumlah penduduk pada angka 8.837.301 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah 8.677.889 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua dari lima provinsi sumabgsel.

3. Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu tercatat pada angka 2.010.670 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,10 persen dengan jumlah penduduk pada angka 2.032.942 jiwa. Tahun 2022

jumlah penduduk meningkat sebesar 1,33 persen dengan jumlah penduduk pada angka 2.060.092 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,30 persen dengan jumlah penduduk pada angka 2.086.883 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan sebesar 1,34 persen dengan jumlah penduduk pada angka 2.115.024 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah 2.061.112 jiwa. Provinsi Bengkulu adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat dari lima provinsi sumbagsel.

4. Provinsi Lampung

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Lampung tercatat pada angka 8.521.201 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat sebesar 6,57 persen dengan jumlah penduduk pada angka 9.081.792 jiwa. Tahun 2022 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,03 persen dengan jumlah penduduk pada angka 9.175.546 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,01 persen dengan jumlah penduduk pada angka 9.269.110 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan sebesar 2,09 persen dengan jumlah penduduk pada angka 9.462.858 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah 9.102.101 jiwa. Provinsi Lampung adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dari lima provinsi sumbagsel.

5. Kep. Bangka Belitung

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kep. Bangka Belitung tercatat pada angka 1.445.678 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat sebesar 0,01 persen dengan jumlah penduduk pada angka 1.473.165 jiwa. Tahun 2022 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,45 persen dengan jumlah penduduk pada angka 1.494.621 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebesar 1,15 persen dengan jumlah penduduk pada angka 1.511.899 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen dengan jumlah penduduk pada angka 1.531.530 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah

1.495.932 jiwa. Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dari lima provinsi sumbagsel.

4.3 Kondisi Ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat, yang pada akhirnya mendorong naiknya tingkat kesejahteraan. Kawasan Sumatera Bagian Selatan, yang mencakup Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung, menunjukkan dinamika ekonomi yang bervariasi sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah. Sumber daya utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini meliputi sektor pertanian dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi di Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu serta sektor pertambangan, seperti batu bara di Jambi dan timah di Bangka Belitung. Adapun laju pertumbuhan PDRB pada provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rupiah) Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024

Provinsi		Tahun					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	PDRB	148.354.25	153.850.63	161.731.95	169.277.52	176.906.50	162.024.17
	PE		3.70	4.83	4.67	4.51	3.42
Sumatera Selatan	PDRB	315.129.22	326.405.18	343.503.62	360.967.45	397.119.63	348.625.02
	PE		3.58	5.23	5.08	10.02	4.76
Bengkulu	PDRB	46.338.43	47.853.78	49.916.06	52.051.56	54.454.65	50.122.90
	PE		3.27	4.31	4.28	4.62	3.29
Lampung	PDRB	240.319.59	246.966.49	257.534.19	269.240.54	281.557.20	259.123.60
	PE		2.77	4.28	4.55	4.57	2.90
Kep.Bangka Belitung	PDRB	52.705.94	55.369.65	57.804.21	60.336.51	60.802.64	57.403.79
	PE		5.88	4.40	4.38	0.77	2.63
Sumbagsel	PDRB	802.847,43	830.445,73	870.490,03	911.873,58	970.840,62	877.299,48

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 yang memuat data PDRB atas dasar harga konstan (miliar) dan laju pertumbuhan ekonomi (persen) dari tahun 2020 hingga 2024 provinsi di Sumatera Bagian Selatan, yang meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Adapun penjelasan mengenai

pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Sumatera Bagian Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi menunjukkan tren yang bervariasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp.148.354,25 miliar. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pada angka 3,70 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.153.850,63 miliar. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,83 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.161.731,95 miliar. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,67 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.169.277,52 miliar. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi naik pada angka 4,51 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.176.906,50 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Jambi selama periode ini adalah 3,42 persen. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan PDRB tertinggi ketiga dari lima provinsi di sumbagsel.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp.315.129,22 miliar. Tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3,58 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.326.405,18 miliar. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik 5,23 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.343.503,62 miliar. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,08 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.360.967,45 miliar, dan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi naik pada angka 10,02 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.397.119,63 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi ini selama periode ini adalah 4,76 persen. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan laju PDRB paling tinggi dari lima provinsi di sumbagsel.

3. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp.46.338,43 miliar. Pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 3,27

persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.47.853,78 miliar. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik 4,31 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.49.916,06 miliar. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi naik 4,28 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.52.051,56 miliar. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi naik 4,62 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.54.454,65 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Bengkulu selama periode ini adalah 3,29 persen. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan laju PDRB terendah dari lima provinsi di sumbagsel.

4. Provinsi Lampung

Provinsi Lampung menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp.240.319,59 miliar. Pada tahun 2021 dan pertumbuhan ekonomi pada angka 2,77 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.246.966,49 miliar. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,28 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.257.534,19 miliar. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi meningkat kembali menjadi 4,55 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.269.240,54 miliar. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi naik diangka 4,57 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.281.557,20 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lampung selama periode ini adalah 2,90 persen. Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan PDRB paling tinggi kedua dari lima provinsi di sumbagsel.

5. Kep. Bangka Belitung

Kep. Bangka Belitung menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp.52.705,94 miliar. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pada 5,88 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.55.369,65 miliar. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik 4,40 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.57.804,21 miliar. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi naik 4,38 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.60.336,51 miliar. Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi naik 0,77 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp.60.802,64 miliar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung adalah 2,63 persen. Kep. Bangka

Belitung merupakan provinsi dengan PDRB paling tinggi keempat dari lima provinsi di sumbagsel.

4.4 Jumlah Penduduk Miskin Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Penduduk miskin adalah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran per kapita setiap bulan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok, baik pangan maupun non-pangan. Individu yang tergolong miskin tidak hanya menghadapi kesulitan finansial, tetapi juga seringkali memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup, pendidikan, serta kondisi kesehatan mereka.

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Miskin Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	277.800	293.860	279.370	280.680	256.420	277.626
Perkembangan %		5,78	-4,93	0,46	-8,64	-1,83
Sumatera Selatan	1.081.590	1.113.760	1.044.690	1.045.680	984.240	1.053.992
Perkembangan %		2,97	-6,20	0,09	-5,87	-2,25
Bengkulu	302.580	306.000	297.230	288.460	281.360	295.126
Perkembangan %		1,13	-2,86	-2,95	-2,46	-1,78
Lampung	1.049.320	1.083.930	1.002.410	970.670	941.230	1.009.512
Perkembangan %		3,29	-7,52	-3,16	-3,03	-2,60
Kep. Bangka Belitung	684.000	737.100	667.800	686.900	699.500	695.060
Perkembangan %		7,76	-9,40	30,11	1,83	7,57
Sumabagsel	1.733.320	1.821.030	1.670.210	1.657.572	1.640.730	1.704.572

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Tabel 4.4 menampilkan data perkembangan jumlah penduduk miskin di lima provinsi wilayah Sumatera Bagian Selatan selama periode 2020–2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi mengalami naik turunnya tingkat kemiskinan, dilihat pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat pada angka 277.800 jiwa. Pada

tahun 2021 meningkat 5,78 persen menjadi 293.860 jiwa. Pada tahun 2022 turun -4,93 persen menjadi 279.370 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin meningkat kembali 0,46 persen menjadi 280.680 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk miskin menurun -8,64 persen menjadi 256.420 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 adalah 277.626 jiwa. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling rendah dibandingkan dengan lima provinsi di sumbagsel.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.081.590 jiwa, meningkat 2,97 persen pada tahun 2021 menjadi 1.113.760 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun -6,20 persen menjadi 1.044.690 jiwa. Tahun 2023 meningkat 0,09 persen menjadi 1.045.680 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali turun -5,87 persen menjadi 984.240 jiwa. Dengan rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 yaitu 1.039.050 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi dibandingkan dengan lima provinsi di sumbagsel.

3. Provinsi Bengkulu

Jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 302.580 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 persen menjadi 306.000 jiwa. Pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan -2,86 persen, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin menjadi 297.230 jiwa. Tahun 2023 jumlah penduduk miskin turun -2,95 persen menjadi 288.460 jiwa. Dan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin menurun -2,46 persen menjadi 281.360 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 adalah 295.126 jiwa. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi keempat dibandingkan dengan lima provinsi di sumbagsel.

4. Provinsi Lampung

Jumlah Penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.049.320 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 3,29 persen menjadi 1.083.930 jiwa. Kemudian jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun berikutnya, pada tahun 2022 turun -7,52 persen menjadi 1.002.410 jiwa. Pada tahun 2023 turun -3,16 persen menjadi 970.670 jiwa. Pada tahun 2024 turun -3,03 persen menjadi 941.230 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung periode 2020-2024 adalah 1.009.512 jiwa. Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua dibandingkan dengan lima provinsi di sumbagsel.

5. Kep. Bangka Belitung

Jumlah penduduk miskin Kep. Bangka Belitung pada tahun 2020 tercatat sebanyak 680.000 jiwa. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 7,76 persen menjadi 737.100 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun -9,40 persen menjadi 667.800 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 30,11 persen menjadi 686.900 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin meningkat Kembali 1,83 persen menjadi 699.500 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk miskin pada periode ini adalah 695.060 jiwa. Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ketiga dibandingkan dengan lima provinsi di sumbagsel.

4.5 Angka Harapan Hidup Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Angka harapan hidup merupakan indikator demografis yang mencerminkan rata-rata usia hidup seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa tingkat kematian yang berlaku saat ini tetap konstan sepanjang hidupnya. Ukuran ini kerap dijadikan tolok ukur untuk menilai kondisi kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan hidup, umumnya menandakan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, asupan gizi yang

memadai, kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian bayi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, angka ini dapat bervariasi antara laki-laki dan perempuan, di mana secara global perempuan cenderung memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang. Namun demikian, angka harapan hidup di wilayah ini masih berada sedikit di bawah angka rata-rata nasional, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke daerah pedalaman untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024

Jenis Kelamin	Wilayah	Tahun					Rata-rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
Laki-laki	Provinsi Jambi	69,27	69,33	69,57	69,83	70,09	69,61
	Provinsi Sumatera Selatan	68,00	68,11	68,38	68,74	69,00	68,44
	Provinsi Bengkulu	67,47	67,54	67,74	67,99	68,21	67,79
	Provinsi Lampung	68,78	68,86	69,07	69,31	69,56	69,11
	Kep. Bangka Belitung	68,77	68,86	69,06	69,30	69,55	69,10
	Rata-rata Sumbagsel	68,45	68,54	68,76	69,03	69,28	68,81
Perempuan	Provinsi Jambi	73,06	73,19	73,49	73,81	74,09	73,52
	Provinsi Sumatera Selatan	71,86	71,95	72,29	72,68	72,95	72,34
	Provinsi Bengkulu	71,27	71,40	71,68	71,94	72,15	71,68
	Provinsi Lampung	72,61	72,69	72,97	73,28	73,54	73,01
	Kep. Bangka Belitung	72,59	72,70	72,97	73,26	73,52	73,00
	Rata-rata Sumbagsel	72,27	72,38	72,68	72,99	73,25	72,71

Sumber: BPS Indonesia, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5 menyajikan data angka harapan hidup berdasarkan jenis kelamin setiap Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2020-2024. Adapun penjelasan mengenai angka harapan hidup masing-masing provinsi di Sumatera Bagian Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Angka harapan hidup Provinsi Jambi pada tahun 2020 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 3 bulan sedangkan untuk jenis kelamin

perempuan yaitu pada umur 73 tahun 1 bulan. Pada tahun 2021 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki pada umur yaitu 69 tahun 3 bulan sedangkan untuk perempuan yaitu pada umur 73 tahun 2 bulan. Pada tahun 2022 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 5 bulan sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 73 tahun 4 bulan. Tahun 2023 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 7 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 73 tahun 7 bulan. Tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 70 tahun 1 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 74 tahun 1 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jambi pada periode 2020-2024 adalah umur 69 tahun 5 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jambi jenis kelamin perempuan pada periode 2020-2024 adalah umur 73 tahun 4 bulan.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 68 tahun sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 71 tahun 7 bulan. Pada tahun 2021 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki pada umur yaitu 68 tahun 1 bulan sedangkan untuk perempuan yaitu pada umur 71 tahun 8 bulan. Pada tahun 2022 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 68 tahun 3 bulan sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 72 tahun 2 bulan. Tahun 2023 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 68 tahun 6 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 72 tahun 5 bulan. Tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun sedangkan perempuan yaitu pada umur 72 tahun 8 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan jenis kelamin laki-laki pada periode 2020-2024 adalah umur 68 tahun 3 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Sumatera Selatan jenis kelamin perempuan pada periode 2020-2024 adalah umur 72 tahun 3 bulan.

3. Provinsi Bengkulu

Angka harapan hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 67 tahun 4 bulan sedangkan untuk jenis

kelamin perempuan yaitu pada umur 71 tahun 2 bulan. Pada tahun 2021 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki pada umur yaitu 67 tahun 4 bulan sedangkan untuk perempuan yaitu pada umur 71 tahun 3 bulan. Pada tahun 2022 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 67 tahun 6 bulan sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 71 tahun 6 bulan. Tahun 2023 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 67 tahun 8 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 71 tahun 8 bulan. Tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 68 tahun 1 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 72 tahun 1 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Bengkulu jenis kelamin laki-laki pada periode 2020-2024 adalah umur 67 tahun 6 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Bengkulu jenis kelamin perempuan pada periode 2020-2024 adalah umur 71 tahun 5 bulan.

4. Provinsi Lampung

Angka harapan hidup Provinsi Lampung pada tahun 2020 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 68 tahun 6 bulan sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 72 tahun 5 bulan. Pada tahun 2021 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki pada umur yaitu 68 tahun 7 bulan sedangkan untuk perempuan yaitu pada umur 72 tahun 5 bulan. Pada tahun 2022 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 1 bulan sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 72 tahun 8 bulan. Tahun 2023 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 2 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 73 tahun 2 bulan. Tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 4 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 73 tahun 4 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Lampung jenis kelamin laki-laki pada periode 2020-2024 adalah umur 69 tahun 1 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Lampung jenis kelamin perempuan pada periode 2020-2024 adalah umur 73 tahun.

5. Kep. Bangka Belitung

Angka harapan hidup Kep. Bangka Belitung pada tahun 2020 dengan jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 68 tahun 6 bulan sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 72 tahun 5 bulan. Pada tahun 2021 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki pada umur yaitu 68 tahun 7 bulan sedangkan untuk perempuan yaitu pada umur 72 tahun 6 bulan. Pada tahun 2022 angka harapan hidup jenis kelamin laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 1 bulan sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu pada umur 72 tahun 8 bulan. Tahun 2023 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 2 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 73 tahun 2 bulan. Tahun 2024 angka harapan hidup laki-laki yaitu pada umur 69 tahun 4 bulan sedangkan perempuan yaitu pada umur 73 tahun 4 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Lampung jenis kelamin laki-laki pada periode 2020-2024 adalah umur 69 tahun 1 bulan. Rata-rata angka harapan hidup Provinsi Lampung jenis kelamin perempuan pada periode 2020-2024 adalah umur 73 tahun.

4.6 Kondisi Ketenagakerjaan Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, termasuk ketersediaan, kualitas, serta penggunaannya dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi, ketenagakerjaan berperan penting karena tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang menggerakkan perekonomian. Tingkat ketenagakerjaan diukur melalui indikator seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan distribusi pekerja formal-informal. Ketenagakerjaan yang optimal akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Adapun jumlah Angkatan kerja pada provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Jumlah Angkatan Kerja Masing-masing Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2020-2024

Provinsi	Tahun					Rata-rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	1.832.993	1.840.594	1.884.278	1.887.840	1.919.342	1.873.009
		0,41	2,36	0,18	1,66	1,15
Sumatera Selatan	4.329.746	4.398.907	4.497.960	4.588.170	4.659.809	4.494.918
		1,59	2,25	2,00	2,34	2,04
Bengkulu	1.075.682	1.060.520	1.076.115	1.107.460	1.136.573	1.091.270
		-1,40	1,47	2,91	2,62	1,4
Lampung	4.489.677	4.494.952	4.595.931	4.904.900	4.996.750	4.696.442
		0,11	2,24	6,72	1,87	2,56
Kep. Bangka Belitung	738.637	738.617	767.603	768.002	818.626	766.297
		-0,002	3,92	0,05	6,59	2,63
Sumabagsel	12.466.735	12.533.590	12.821.887	13.256.372	13.531.100	12.921.937

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2025

Tabel 4.6 menampilkan data jumlah angkatan kerja lima Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2020-2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.832.993 jiwa. Pada tahun 2021 angkatan kerja meningkat 0,41 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.840.594 jiwa. Pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat 2,36 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.884.278 jiwa. Pada tahun 2023 angkatan kerja kembali meningkat 0,18 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.887.840 jiwa. Pada tahun 2024 angkatan kerja meningkat 1,66 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.919.342 jiwa. Rata-rata jumlah angkatan kerja Provinsi Jambi yaitu 1.873.009 jiwa. Provinsi Jambi merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi ketiga setelah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.329.746 jiwa. Pada tahun 2021 angkatan kerja

meningkat 1,59 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.398.907 jiwa. Pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat 2,25 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.497.960 jiwa. Pada tahun 2023 angkatan kerja meningkat 2,00 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.588.170 jiwa. Pada tahun 2024 angkatan kerja meningkat secara signifikan yaitu 2,34 persen jumlah angkatan kerja menjadi 4.659.809 jiwa. Rata-rata jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Selatan yaitu 4.494.918 jiwa. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi kedua setelah provinsi Lampung.

3. Provinsi Bengkulu

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.075.682 jiwa. Pada tahun 2021 angkatan kerja menurun -1,40 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.060.520 jiwa. Pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat 1,47 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.076.115 jiwa. Pada tahun 2023 angkatan kerja meningkat signifikan yaitu 2,91 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.107.460 jiwa. Pada tahun 2024 angkatan kerja meningkat 2,62 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 1.136.573 jiwa. Rata-rata jumlah angkatan kerja Provinsi Bengkulu yaitu 1.091.270 jiwa. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja terbanyak keempat dibandingkan provinsi lainnya.

4. Provinsi Lampung

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.489.677 jiwa. Pada tahun 2021 angkatan kerja meningkat 0,11 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.494.952 jiwa. Pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat 2,24 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.595.931 jiwa. Pada tahun 2023 angkatan kerja meningkat signifikan yaitu 6,72 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.904.900 jiwa. Pada tahun 2024 angkatan kerja meningkat 1,87 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 4.999.750 jiwa. Rata-rata jumlah angkatan kerja Provinsi Lampung yaitu 4.696.442 jiwa. Provinsi Lampung

merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.

5. Kep. Bangka Belitung

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tercatat sebanyak 738.637 jiwa. Pada tahun 2021 angkatan kerja menurun -0,002 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 738.617 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah Angkatan meningkat 3,92 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 767.603 jiwa. Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja meningkat 0,05 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 768.002 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja meningkat signifikan yaitu 6,59 persen dengan jumlah angkatan kerja menjadi 818.626 jiwa. Rata-rata jumlah angkatan kerja Kep. Bangka Belitung yaitu 766.297 jiwa. Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah angkatan kerja paling rendah dibandingkan lima provinsi lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Dinamika Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024

Dinamika Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum berperan yang sangat penting pada penentuan tingkat kemiskinan di suatu negara. IPM yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, jika mengalami peningkatan, memperlihatkan bahwasanya masyarakat memiliki akses yang lebih baik pada layanan dasar dan peluang ekonomi. Hal ini secara langsung dapat mengurangi kemiskinan karena individu yang lebih sehat dan berpendidikan biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi nantinya memperburuk situasi kemiskinan karena semakin banyak orang yang kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan tetap, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi jalan utama dalam mengurangi kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh, tercipta lapangan kerja baru dan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan kesejahteraan mereka ikut naik. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang adil dan kebijakan sosial yang tepat. Salah satu kebijakan penting adalah penetapan upah minimum yang layak, yang berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja berpenghasilan rendah agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Upah minimum yang memadai membantu memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar, sekaligus mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas. Secara keseluruhan, pengurangan kemiskinan memerlukan sinergi antara peningkatan kualitas sumber daya manusia (yang tercermin pada IPM), penurunan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kebijakan upah minimum

yang tepat. Tanpa perhatian pada salah satu aspek ini, upaya menekan angka kemiskinan akan sulit tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pertama, penulis menyajikan dinamika masing-masing variabel penelitian sepanjang periode 2015 hingga 2024. Adapun variabel yang akan dipaparkan dinamikanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan.

5.1.1 Dinamika Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai alat untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Kualitas tersebut tercermin dari tingginya capaian pendidikan dan derajat kesehatan, yang salah satunya ditunjukkan melalui ketersediaan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. IPM menjadi indikator krusial dalam pembangunan ekonomi, karena semakin baik mutu manusia, maka produktivitas dan tingkat pendapatan pun cenderung meningkat.

Berikut dapat dilihat dinamika Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024:

Tabel 5. 1 Dinamika Indeks Pembangunan Manusia Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	72,29	72,62	73,11	73,73	74,36	71,76
Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	71,62	71,83	72,48	73,18	73,84	70,69
Bengkulu	68,69	69,33	69,95	70,64	71,21	72,93	73,16	73,68	74,30	74,91	72,02
Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	71,04	71,25	71,79	72,48	73,13	70,11
Kep. Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	72,74	72,96	73,50	74,09	74,55	71,59
IPM Sumbagsel	68,21	68,88	69,41	70,07	70,67	72,12	72,36	72,91	73,56	74,16	71,24
TK Sumbagsel	12,03	11,72	11,42	10,81	10,56	20,37	10,73	10,03	9,81	9,37	10,69

Sumber: BPS berbagai Provinsi, 2024

Tabel 5.1 menunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia dan rata-rata tingkat kemiskinan di lima Provinsi Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015-2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

IPM Provinsi Jambi meningkat dari 68,89 pada 2015 menjadi 69,62 pada 2016, naik 0,73 poin, didorong oleh peningkatan akses pendidikan dan layanan dasar. Tahun 2017 naik 0,37 poin menjadi 69,99, mencerminkan tren stabilitas pembangunan. Tahun 2018 mencatat kenaikan 0,66 poin, menunjukkan dampak dari program infrastruktur dasar dan pengembangan SDM. Tahun 2019–2020, terjadi lonjakan 1,03 poin menjadi 72,29, yang dipengaruhi oleh perluasan program bantuan sosial dan peningkatan pengeluaran pemerintah selama awal pandemi. Meski tahun 2021 hanya naik 0,33 poin, dan 2022 naik 0,49 poin, tren tetap positif. Tahun 2023 IPM naik 0,62 poin ke 73,73, menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tahun 2024 naik lagi 0,63 poin menjadi 74,36, memperkuat peran pembangunan pendidikan dan daya beli masyarakat. Tidak ditemukan penurunan, menunjukkan stabilitas pembangunan manusia.

2. Provinsi Sumatera Selatan

IPM Sumatera Selatan naik 0,78 poin dari 67,46 pada tahun 2015 ke 68,24 pada tahun 2016, menunjukkan perbaikan signifikan di bidang kesehatan dan ekonomi lokal. Tahun 2017 naik 0,62 poin, dan tahun 2018 naik 0,53 poin, berkat pengembangan pendidikan dasar dan infrastruktur. Kenaikan signifikan terjadi tahun 2019–2020 sebesar 1,60 poin, menandakan kebijakan seperti BLT dan subsidi pendidikan sangat efektif menjaga kualitas hidup saat pandemi COVID-19. Tahun 2021 naik tipis 0,21 poin, kemungkinan karena dampak ekonomi dari pembatasan aktivitas sosial. Namun IPM meningkat 0,65 poin di 2022 dan 2023 sebesar 0,70 poin. Tahun 2024 naik 0,66 poin menjadi 73,84, mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi yang cepat.

3. Provinsi Bengkulu

Tahun 2015–2016, IPM Bengkulu naik 0,64 poin menjadi 69,33, mencerminkan peningkatan layanan dasar. Tahun 2017 naik 0,62 poin, dan tahun 2018 naik 0,69 poin, didorong oleh meningkatnya partisipasi sekolah dan penurunan angka kemiskinan. Kenaikan tajam terjadi pada 2019–2020

sebesar 1,72 poin, terbesar dari seluruh provinsi, kemungkinan akibat program bantuan social skala besar saat pandemi. Tahun 2021 hanya naik 0,23 poin karena aktivitas social dan pendidikan terganggu. Namun tahun 2022–2024 kembali mencatat peningkatan stabil, masing-masing 0,52, 0,62, dan 0,61 poin, mencerminkan keberhasilan pemulihan dan distribusi layanan publik yang lebih merata.

4. Provinsi Lampung

Lampung meningkat 0,70 poin pada 2016, lalu naik 0,60 poin di 2017, menandakan program pemerataan pendidikan mulai efektif. Tahun 2018 naik 0,77 poin, didukung perbaikan gizi dan pengurangan stunting. Kenaikan tajam terjadi tahun 2019–2020 sebesar 1,47 poin, didorong oleh belanja sosial pemerintah dan digitalisasi sektor Pendidikan saat pandemi. Tahun 2021 naik 0,21 poin, lebih rendah karena penyesuaian sistem dan daya beli masyarakat yang tertekan. Tahun 2022–2024 kembali mencatat tren positif dengan kenaikan masing-masing 0,54, 0,69, dan 0,65 poin, didukung oleh pemulihan pendapatan, percepatan vaksinasi, dan perbaikan layanan sekolah.

5. Kep. Bangka Belitung

Provinsi ini memiliki IPM awal tertinggi di Sumbagsel pada 2015 yaitu 69,05 dan terus meningkat. Tahun 2016–2018 naik stabil: 0,50, 0,44, dan 0,68 poin, berkat pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang dan pariwisata. Tahun 2019–2020 IPM naik 1,44 poin, menandakan bahwa bantuan sosial dan peningkatan pengeluaran publik sangat berdampak pada masyarakat. Tahun 2021 naik sedikit 0,22 poin, lalu tahun 2022–2024 kembali stabil naik 0,54, 0,59, dan 0,46 poin, didorong oleh penguatan ekonomi lokal, perluasan layanan internet untuk pendidikan, dan investasi di layanan dasar.

Secara umum, semua provinsi mengalami tren kenaikan IPM dari tahun ke tahun, meskipun terdapat perlambatan atau stagnasi pada tahun-tahun awal pandemi COVID-19 (2020–2021). Tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten pada seluruh provinsi, mencerminkan pemulihan pasca pandemi dan peningkatan dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran riil per kapita.

Provinsi Bengkulu memiliki nilai IPM tertinggi (71,59) dari kelima provinsi di Pulau Sumatera bagian selatan, hal ini disebabkan oleh stabilitas pertumbuhan sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses pada layanan dasar yang cukup merata, walaupun wilayahnya tergolong kecil dan tidak sepadat provinsi lain. Provinsi Jambi adalah Provinsi dengan nilai IPM tertinggi kedua (71,76). Jambi memiliki kekuatan ekonomi dari sektor pertambangan dan perkebunan, terutama minyak dan kelapa sawit. Penerimaan daerah yang tinggi berkontribusi pada peningkatan layanan publik, seperti Pendidikan dan kesehatan. Provinsi ketiga adalah Kep. Bangka Belitung dengan nilai IPM (71,59), faktor utamanya adalah pendapatan per kapita yang cukup tinggi, karena sektor pertambangan timah dan pariwisata. Namun, tantangan geografis menyebabkan perkembangan layanan pendidikan dan kesehatan tidak secepat provinsi daratan, sehingga IPM-nya sedikit di bawah Jambi dan Bengkulu. Provinsi keempat adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai IPM (70,69), sektor industri dan energi menyumbang besar terhadap ekonomi, namun akses layanan dasar yang belum merata menahan laju peningkatan IPM. Provinsi dengan nilai IPM terendah adalah Provinsi Lampung (70,11) karena tantangan dalam pendidikan (tingkat putus sekolah cukup tinggi) dan kualitas infrastruktur Kesehatan membuat IPM meningkat lebih lambat dibandingkan provinsi lain di Sumbagsel.

Berdasarkan data rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan pada periode 2015-2024, terlihat bahwa secara umum perkembangan IPM cenderung positif pada hampir seluruh tahun. Nilai perkembangan IPM ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak meskipun dengan variasi yang tidak terlalu besar antar tahun. Sebaliknya, rata-rata tingkat kemiskinan menunjukkan pola yang cenderung negatif pada sebagian besar tahun, yang mengindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin pada periode tersebut. Namun demikian, terdapat tahun-tahun dengan Tingkat Kemiskinan positif, yang menunjukkan adanya kenaikan angka kemiskinan di tahun-tahun tersebut. Hubungan rata-rata IPM dan Tingkat Kemiskinan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum terdapat hubungan negatif (berbanding terbalik) dimana ketika IPM meningkat,

tingkat kemiskinan cenderung menurun. Namun, korelasi ini tidak absolut, sehingga intervensi pembangunan harus tetap mengutamakan pemerataan hasil pembangunan agar peningkatan IPM benar-benar efektif menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

5.1.2 Dinamika Tingkat Pengangguran Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Salah satu indikator penting untuk menilai jumlah pengangguran dalam kelompok angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini disajikan dinamika tingkat pengangguran di setiap provinsi yang berada di wilayah Sumatera Bagian Selatan selama periode 2015 hingga 2024:

Tabel 5. 2 Dinamika Tingkat Pengangguran Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	4,34	4,00	3,84	3,73	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53	4,48	4,37
Sumatera Selatan	6,07	4,31	4,39	4,27	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11	3,86	4,67
Bengkulu	4,91	3,30	3,74	3,35	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42	3,11	3,68
Lampung	5,14	4,62	4,33	4,04	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23	4,19	4,45
Kep. Bangka Belitung	6,29	2,60	3,78	3,61	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56	4,63	4,41
TP Sumbagsel	5,35	3,77	4,02	3,80	3,89	4,93	4,69	4,42	4,17	4,05	4,31
TK Sumabgsel	12,03	11,72	11,42	10,81	10,56	20,37	10,73	10,03	9,81	9,37	10,69

Sumber: BPS berbagai Provinsi, 2024

Tabel 5.2 menunjukkan data tingkat pengangguran terbuka dan rata-rata tingkat kemiskinan di lima provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015-2024, Penjelasannya sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Pada 2015, tingkat pengangguran Jambi sebesar 4,34 persen. Tahun 2016 terjadi penurunan 0,34 poin menjadi 4,00 persen, menandakan perbaikan kesempatan kerja. Tahun 2017 dan 2018 menurun lagi menjadi 3,84 persen dan 3,73 persen secara berturut-turut, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang semakin baik, terutama di sektor pertanian dan industri kecil. Namun pada 2019 naik 0,33 poin menjadi 4,06 persen, karena perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi investasi lokal. Pada 2020, terjadi

lonjakan tajam ke 5,13 persen dengan perkembangan 1,07 poin akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak PHK dan penurunan aktivitas usaha. Tahun 2021 sedikit menurun 0,04 poin menjadi 5,09 persen, lalu berlanjut turun ke 4,59 persen dengan perkembangan 0,50 poin pada 2022 seiring pemulihan ekonomi. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan bertahap ke 4,53 persen serta akhir 2024 pada angka 4,48 persen, mencerminkan stabilisasi lapangan kerja dan pemulihan sektor informal.

2. Provinsi Sumatera Selatan

TPT Sumatera Selatan pada 2015 sebesar 6,07 persen dan turun drastis 1,76 poin dengan angka tingkat pengangguran 4,31 persen pada 2016, mungkin karena proyek infrastruktur besar yang membuka banyak lapangan kerja. Tahun 2017 dan 2018 stabil di kisaran 4,3–4,2 persen. Pada 2019 terjadi sedikit kenaikan 0,26 poin menjadi 4,53 persen, dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Tahun 2020 melonjak tajam 0,98 poin dengan angka tingkat pengangguran 5,51 persen akibat pandemi. Namun tahun 2021 turun signifikan 0,53 poin dengan angka tingkat pengangguran 4,98 persen, dan terus menurun 0,35 poin dengan angka tingkat pengangguran 4,63 persen pada 2022 dan 4,11 persen turun 0,52 poin pada 2023, menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup cepat. Namun di akhir 2024 kembali turun 0,25 poin dengan angka tingkat pengangguran 3,86 persen, yang disebabkan oleh dinamika pasar tenaga kerja dan perubahan permintaan industri.

3. Provinsi Bengkulu

Pengangguran Bengkulu pada 2015 sebesar 4,91 persen, menurun drastis 1,61 poin pada 2016 menjadi 3,30 persen, menandakan pengembangan lapangan kerja yang baik. Tahun 2017 naik 0,44 poin menjadi 3,74 persen, akibat fluktuasi musiman atau proyek industri yang berkurang. Tahun 2018 dan 2019 turun lagi ke 3,35 persen dan 3,26 persen, menandakan perbaikan berkelanjutan. Namun tahun 2020 naik tajam sebesar 0,81 poin dengan angka tingkat pengangguran 4,07 persen karena pandemi. Tahun 2021 turun ke 3,65 persen dan terus menurun ke 3,59 persen, 3,42 persen, dan 3,11

persen pada 2024, menunjukkan pemulihan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup baik pasca pandemi, terutama di sektor pertanian dan jasa.

4. Provinsi Lampung

Lampung mulai dari 5,14 persen pengangguran di 2015 dan menurun bertahap hingga 4,03 persen pada 2019, dengan penurunan rata-rata 0,2 poin per tahun karena pengembangan sektor industri dan perdagangan. Pada 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,64 poin menjadi 4,67 persen akibat pandemi. Tahun 2021 dan 2022 relatif stabil di angka 4,69 persen dan 4,52 persen, lalu turun ke 4,23 persen dan 4,19 persen pada 2023 dan 2024, namun kembali naik menjadi 4,45 persen di akhir 2024, karena dinamika pasar tenaga kerja lokal dan inflasi.

5. Kep. Bangka Belitung

TPT Kep. Bangka Belitung pada 2015 sebesar 6,29 persen, turun drastis sebesar 3,69 poin dengan angka tingkat pengangguran 2,60 persen di 2016, karena booming investasi dan proyek besar. Tahun 2017–2019 stabil di kisaran 3,5–3,7 persen. Pada 2020 naik tajam sebesar 1,67 poin dengan angka tingkat kemiskinan 5,25 persen karena pandemi. Tahun 2021 dan 2022 turun menjadi 5,03 persen dan 4,77 persen, lalu turun lagi ke 4,56 persen pada 2023. Namun pada 2024 terjadi kenaikan kecil ke 4,63 persen, mencerminkan ketidakpastian ekonomi dan penyesuaian pasar tenaga kerja lokal.

Secara umum, tingkat pengangguran di seluruh provinsi Sumbagsel menunjukkan fluktuasi, dengan kenaikan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, pengangguran mulai menurun secara bertahap, namun belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi. Tingkat pengangguran tertinggi di Sumbagsel terdapat di Sumatera Selatan (4,67 persen). Meskipun provinsi ini memiliki sektor ekonomi besar, terutama di energi dan pertambangan, namun serapan tenaga kerja tidak sebanding dengan ekspansi ekonominya karena kapasitas industri yang padat modal, bukan padat karya. Selain itu, urbanisasi cepat di Palembang menciptakan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, khususnya untuk tenaga kerja terampil. Provinsi kedua

adalah Provinsi Lampung (4,45 persen). Pengangguran di Lampung cukup tinggi karena struktur ekonominya yang berbasis pertanian tradisional, yang sifatnya musiman dan rentan terhadap gejolak iklim. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga menyebabkan mismatch antara pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja, khususnya di sektor industri dan jasa yang sedang berkembang. Provinsi ketiga adalah Kep. Bangka Belitung (4,41 persen). Bangka Belitung mengalami pengangguran tinggi karena ketergantungan besar pada sektor tambang timah, yang mengalami fluktuasi tajam dan penurunan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Transisi ke sektor lain seperti pariwisata dan UMKM masih berjalan lambat, sehingga tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di tambang belum sepenuhnya terserap kembali ke sektor formal lainnya. Provinsi keempat adalah Provinsi Jambi (4,37 persen). Jambi memiliki tingkat pengangguran yang relatif moderat. Sektor utama seperti perkebunan sawit dan migas memang mendominasi, namun perluasan perkebunan dan proyek infrastruktur turut membuka lapangan kerja baru. Walau begitu, masalah ketimpangan antarwilayah menyebabkan masih ada daerah yang kurang tersentuh pembangunan ekonomi. Provinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah adalah Provinsi Bengkulu (3,68 persen). Bengkulu mencatat pengangguran terendah. Meskipun ekonominya tidak sekuat provinsi lain, karakteristik demografi dan dominasi sektor informal seperti pertanian dan perdagangan lokal memungkinkan masyarakat lebih cepat beradaptasi terhadap guncangan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi di sektor informal turut menekan angka pengangguran terbuka.

Berdasarkan data periode 2015–2024, terlihat bahwa penurunan tingkat pengangguran di Sumbagsel umumnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, meskipun tidak selalu proporsional. Rata-rata tingkat pengangguran Sumbagsel menurun dari 5,35 persen pada 2015 menjadi 4,05 persen pada 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menurun dari 12,03 persen pada 2015 menjadi 9,37 persen pada 2024, meskipun sempat meningkat tajam pada 2020 menjadi 20,37 persen akibat dampak pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan menimbulkan PHK massal. Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa

penurunan pengangguran memiliki kontribusi penting dalam mengurangi kemiskinan di wilayah Sumbagsel, meskipun faktor lain seperti kualitas pekerjaan dan upah minimum juga perlu diperhatikan untuk memastikan kesejahteraan penduduk secara merata.

5.1.3 Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan di suatu negara atau wilayah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu, yang tercermin melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini kerap digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di wilayah Sumatera Bagian Selatan, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang dinamis dan memiliki potensi besar. Berikut adalah gambaran dinamika pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di kawasan tersebut selama tahun 2015 hingga 2024.

Tabel 5. 3 Dinamika Pertumbuhan ekonomi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	4,21	4,37	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,70	5,12	4,67	4,51	3,97
Sumatera Selatan	4,42	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08	5,03	4,55
Bengkulu	5,13	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28	4,62	4,18
Lampung	5,13	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55	4,57	4,04
Kep. Bangka Belitung	4,08	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,29	5,05	4,40	4,38	0,77	3,27
PE Sumabgsel	4,59	4,79	4,49	5,07	4,71	-0,92	3,67	4,67	4,59	3,90	4,00
TK Sumbagsel	12,03	11,72	11,42	10,81	10,56	20,37	10,73	10,03	9,81	9,37	10,69

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Tabel 5.3 menunjukkan data pertumbuhan ekonomi dan rata-rata tingkat kemiskinan di lima provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015-2024, Penjelasannya sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada tahun 2015 sebesar 4,21 persen, kemudian meningkat berturut-turut hingga mencapai 4,69 persen di 2018,

dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,16 poin per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya produksi perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, serta investasi di sektor infrastruktur. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan ke 4,35 persen sebesar 0,34 poin karena pelemahan harga komoditas global. Dampak paling signifikan terjadi di tahun 2020 saat pandemi COVID-19, ekonomi Jambi berkontraksi tajam sebesar 4,86 poin menjadi -0,51 persen akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Pada 2021, Jambi bangkit sebesar 4,21 poin dengan pertumbuhan 3,70 persen, lalu meningkat lagi ke 5,12 persen di 2022, menunjukkan pemulihan kuat terutama di sektor jasa dan perdagangan. Tahun 2023 dan 2024 mengalami sedikit koreksi ke 4,67 persen dan 4,51 persen, diakibatkan tekanan inflasi global dan penurunan daya beli masyarakat.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan berada di angka 4,42 persen, lalu meningkat secara konsisten sebesar 1,59 poin dalam tiga tahun hingga mencapai 6,01 persen di 2018. Hal ini didorong oleh aktivitas pertambangan, ekspor batubara, serta pembangunan infrastruktur. Tahun 2019 sedikit melemah sebesar 0,32 poin dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,69 persen, dan saat pandemi 2020 mengalami kontraksi tipis sebesar 5,80 poin dengan angka pertumbuhan ekonomi -0,11 persen. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pemulihan tajam ke 3,58 persen dan 5,23 persen, didorong oleh pemulihan ekspor dan belanja pemerintah. Tahun 2023 dan 2024 mengalami stabilisasi di angka 5,08 persen dan 5,03 persen, yang bisa jadi terkait dengan penurunan harga komoditas dan tekanan global terhadap ekspor.

3. Provinsi Bengkulu

Bengkulu menunjukkan pertumbuhan stabil antara 5,13 persen hingga 4,94 persen dari 2015 hingga 2019, dengan sedikit fluktuasi tahunan sekitar 0,2 poin. Pandemi 2020 menyebabkan kontraksi ringan sebesar 4,96 poin dengan angka pertumbuhan ekonomi -0,02 persen, relatif lebih kecil dibanding provinsi lain, kemungkinan karena dominasi sektor pertanian

yang tetap berjalan. Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29 poin dengan angka pertumbuhan ekonomi ke 3,27 persen, dan terus naik ke 4,31 persen pada 2022, serta 4,28 persen di 2023. Kemudian pada tahun 2024 semakin meningkat sebesar 0,34 poin dengan angka pertumbuhan ekonomi 4,62 persen, yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan global dan pergeseran konsumsi lokal.

4. Provinsi Lampung

Selama 2015–2019, Lampung mempertahankan pertumbuhan stabil sekitar 5,13 persen hingga 5,26 persen, menunjukkan performa ekonomi yang konsisten dari sektor pertanian dan UMKM. Tahun 2020 ekonomi berkontraksi tajam sebesar 6,92 poin menjadi –1,66 persen, salah satu yang terdalam di wilayah Sumbagsel, karena terdampak kerasnya pembatasan sosial terhadap sektor perdagangan dan industri rumah tangga. Pemulihan berjalan lambat di 2021 senilai 2,77 persen dan berlanjut ke 4,28 persen dan 4,55 persen pada 2022–2023. Namun, 2024 menunjukkan stagnasi di 4,57 persen.

5. Kep. Bangka Belitung

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung cukup fluktuatif. Dari 4,08 persen tahun 2015, sempat naik ke 4,47 persen pada tahun 2017, namun menurun drastis sebesar 1,15 poin dalam dua tahun menjadi 3,32 persen pada 2019, diduga karena penurunan harga timah dan ekspor tambang. Pandemi 2020 membuat ekonomi berkontraksi lebih dalam menjadi –2,29 persen dengan perubahan sebesar 5,61 poin, terparah di Sumbagsel. Namun, tahun 2021 justru melonjak drastis sebesar 7,34 poin menjadi 5,05 persen, dipicu rebound sektor pertambangan dan pariwisata. Tahun 2022–2023 stabil di 4,40 persen dan 4,38 persen, tapi 2024 turun tajam ke 0,77 persen, kemungkinan besar akibat fluktuasi tajam harga timah, penurunan permintaan global, dan tekanan ekspor.

Secara umum, seluruh provinsi mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun setelah itu, sebagian besar menunjukkan pemulihan yang bertahap, meskipun laju pemulihan tidak merata. Rata-rata

pertumbuhan ekonomi selama dekade ini tetap berada pada kisaran 3–4,5 persen, yang tergolong moderat untuk kawasan berkembang. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ini (4,55 persen). Faktor pendorong utamanya adalah industri energi dan pertambangan (batubara, gas bumi) serta infrastruktur transportasi yang relatif lebih maju, seperti jalan tol dan jalur kereta angkutan barang. Provinsi kedua adalah Provinsi Bengkulu (4,18 persen). Bengkulu tumbuh stabil karena ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan yang cukup tangguh saat pandemi. Meskipun kontribusi industri masih rendah, stabilitas konsumsi domestik dan peningkatan infrastruktur dasar dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan yang konsisten. Provinsi ketiga adalah Provinsi Lampung (4,04 persen). Lampung memiliki pertumbuhan yang juga stabil, terutama karena diversifikasi sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian (seperti kopi, singkong, dan gula). Letaknya yang strategis dekat dengan Jawa membuat Lampung menjadi jalur logistik penting. Namun, kurangnya investasi industri besar menyebabkan pertumbuhannya tidak secepat Sumatera Selatan. Provinsi keempat adalah Provinsi Jambi (3,97 persen). ketergantungan pada komoditas mentah dan terbatasnya hilirisasi membuat perekonomian Jambi cukup rentan terhadap fluktuasi harga global. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kep. Bangka Belitung (3,27 persen). Bangka Belitung mencatat pertumbuhan ekonomi terendah dalam dekade ini. Ini terutama disebabkan oleh ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan timah, yang dalam beberapa tahun terakhir menurun tajam akibat regulasi ekspor, kerusakan lingkungan, dan fluktuasi harga global. Upaya diversifikasi ke sektor pariwisata dan kelautan masih belum mampu menjadi penopang utama, sehingga pemulihannya lambat.

Berdasarkan data periode 2015–2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) di wilayah Sumbagsel cenderung fluktuatif, dengan rata-rata tertinggi pada 2018 sebesar 5,07 persen dan terendah pada 2020 sebesar -0,92 persen akibat kontraksi ekonomi selama pandemi Covid-19. Penurunan drastis pada 2020 tersebut diikuti oleh lonjakan tingkat kemiskinan menjadi 20,37 persen pada tahun yang sama, mencerminkan dampak langsung penurunan pertumbuhan ekonomi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat hilangnya aktivitas

ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Setelah 2020, pertumbuhan ekonomi kembali positif meskipun moderat, berkisar 3,67 persen–4,67 persen, dan diiringi penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten hingga mencapai 9,37 persen pada 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Sumbagsel, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi distribusi hasil pembangunan dan stabilitas ekonomi makro, seperti yang terlihat dari anomali tahun 2020 ketika kontraksi ekonomi menyebabkan lonjakan kemiskinan yang signifikan.

5.1.4 Dinamika Upah Minimum Provinsi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Upah minimum merupakan batas terendah upah bulanan yang mencakup gaji pokok beserta tunjangan tetap, yang ditetapkan oleh gubernur sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar. Penetapan ini juga bertujuan untuk memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata. Dalam penentuannya, upah minimum memperhitungkan sejumlah faktor seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian. Berikut dinamika Upah Minimum Provinsi di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan tahun 2015-2024:

Tabel 5. 4 Dinamika Upah Minimum Provinsi Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	1.710.000	1.906.650	2.063.948	2.243.718	2.243.718	2.630.162	2.630.162	2.698.940	2.943.033	3.037.121	2.410.745
Perkembangan %		11,5	8,25	8,71	0	17,22	0	2,61	9,04	3,19	6,72
Sumatera Selatan	1.974.346	2.206.000	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.144.446	3.144.446	3.404.177	3.456.874	2.816.185
Perkembangan %		11,73	8,25	8,71	8,02	8,50	3,32	0	8,25	1,54	6,48
Bengkulu	1.500.000	1.605.000	1.737.413	1.888.741	2.040.407	2.213.604	2.215.000	2.238.094	2.418.280	2.507.079	2.036.362
Perkembangan %		7	8,25	8,70	8,03	8,48	0,06	1,04	8,05	4,13	5,97
Lampung	1.581.000	1.763.000	1.908.448	2.074.673	2.241.270	2.430.002	2.432.002	2.440.486	2.633.285	2.716.497	2.222.066
Perkembangan %		11,51	8,25	8,70	8,03	8,42	0	0,34	7,90	3,16	6,26
Kep.Bangka Belitung	2.100.000	2.341.500	2.534.674	2.755.444	2.976.706	3.230.024	3.230.024	3.264.884	3.498.479	3.640.000	2.957.174
Perkembangan %		11,50	8,25	8,70	8,02	8,51	0	1,07	7,15	4,04	6,36
Rata-rata Perkembangan UM		10,64	8,25	8,70	6,42	10,22	0,67	1,02	8,07	3,21	6,35
TK Sumabgsel	12,03	11,72	11,42	10,81	10,56	20,37	10,73	10,03	9,81	9,37	10,69

Sumber: BPS berbagai Provinsi, (diolah)

Tabel 5.4 menunjukkan data perkembangan upah minimum provinsi dan rata-rata tingkat kemiskinan di lima provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015-2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Upah minimum Provinsi Jambi yang diawali dari tahun 2015 tercatat pada angka Rp.1.710.000. Pada tahun 2016 perkembangan upah minimum naik 11,5 persen dengan angka sebesar Rp.1.906.650. Pada tahun 2017 perkembangan upah minimum naik 8,25 persen dengan angka Rp.2.063.948. Pada tahun 2018 perkembangan upah minimum naik 8,71 persen dengan angka Rp.2.243.718. Pada tahun 2019 perkembangan upah minimum tidak mengalami perubahan dengan angka Rp.2.243.71. Pada tahun 2020 perkembangan upah minimum naik 17,22 persen dengan angka Rp.2.630.162. Pada tahun 2021 perkembangan upah minimum tidak mengalami perubahan dengan angka upah minimum tetap. Pada tahun 2022 perkembangan upah minimum naik 2,61 persen dengan angka Rp.2.698.940. Pada tahun 2023 perkembangan upah minimum naik 9,04 persen dengan angka Rp.2.943.033. Pada tahun 2024 perkembangan upah minimum naik 3,19 persen dengan angka Rp.3.037.121. Rata-rata upah minimum di Provinsi Jambi yaitu Rp.2.410.745.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan dengan upah minimum pada tahun 2015 terdapat pada angka Rp.1.974.346. Pada tahun 2016 perkembangan upah minimum naik 11,73 persen dengan angka Rp.2.206.000. Pada tahun 2017 perkembangan upah minimum naik 8,25 persen dengan angka Rp.2.388.000. Pada tahun 2018 perkembangan upah minimum naik 8,71 persen dengan angka Rp.2.595.995. Pada tahun 2019 perkembangan upah minimum naik 8,02 persen dengan angka Rp.2.804.453. Pada tahun 2020 perkembangan upah minimum naik 8,50 persen dengan angka Rp.3.043.111. Pada tahun 2021 perkembangan upah minimum naik 3,32 persen dengan angka Rp.3.144.446. Pada tahun 2022 perkembangan upah minimum tidak mengalami perubahan dengan angka upah minimum tetap.

Pada tahun 2023 perkembangan upah minimum naik 8,25 persen dengan angka Rp.3.404.177. Pada tahun 2024 perkembangan upah minimum naik 1,54 persen dengan angka Rp.3.456.874. Rata-rata upah minimum Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2015-2024 adalah Rp.2.816.185.

3. Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu dengan upah minimum pada tahun 2015 adalah Rp.1.500.000. Pada tahun 2016 perkembangan upah minimum naik 7 persen dengan angka Rp.1.605.000. Pada tahun 2017 perkembangan upah minimum naik 8,25 persen dengan angka Rp.1.737.413. Pada tahun 2018 perkembangan upah minimum naik 8,70 persen dengan angka Rp.1.888.471. Pada tahun 2019 perkembangan upah minimum naik 8,03 persen dengan angka Rp.2.040.407. Pada tahun 2020 perkembangan upah minimum naik 8,48 persen dengan angka Rp.2.213.604. Pada tahun 2021 perkembangan upah minimum naik 0,06 persen dengan angka Rp.2.215.000. Pada tahun 2022 perkembangan upah minimum naik 1,04 persen dengan angka Rp.2.238.094. Pada tahun 2023 perkembangan upah minimum naik 8,05 persen dengan angka Rp.2.418.280. Pada tahun 2024 perkembangan upah minimum naik 4,13 persen dengan angka Rp.2.507.079. Rata-rata upah minimum Provinsi Bengkulu pada periode 2015-2024 adalah Rp.2.036.362 yang menjadikan Provinsi Bengkulu menjadi daerah paling rendah angka upah minimumnya.

4. Provinsi Lampung

Upah minimum Provinsi Lampung pada tahun 2015 tercatat pada Rp.1.581.000. Pada tahun 2016 perkembangan upah minimum naik 11,51 persen dengan angka Rp.1.763.000. Pada tahun 2017 perkembangan upah minimum naik 8,25 persen dengan angka Rp.1.908.448. Pada tahun 2018 perkembangan upah minimum naik 8,70 persen dengan angka Rp.2.074.673. Pada tahun 2019 perkembangan upah minimum naik 8,03 persen dengan angka Rp.2.241.270. Pada tahun 2020 perkembangan upah minimum naik 8,42 persen dengan angka Rp.2.430.002. Pada tahun 2021 perkembangan upah minimum tidak mengalami perubahan dengan angka

upah minimum tetap. Pada tahun 2022 perkembangan upah minimum naik 0,34 persen dengan angka Rp.2.440.486. Pada tahun 2023 perkembangan upah minimum naik 7,90 persen dengan angka Rp.2.633.285. Pada tahun 2024 perkembangan upah minimum naik 3,16 persen dengan angka Rp.2.716.497. Rata-rata upah minimum Provinsi Lampung pada periode 2015-2024 adalah Rp.2.222.066.

5. Kep. Bangka Belitung

Upah minimum Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat pada Rp.2.100.000. Pada tahun 2016 perkembangan upah minimum naik 11,50 persen dengan angka Rp.2.341.500. Pada tahun 2017 perkembangan upah minimum naik 8,70 persen dengan angka Rp.2.534.674. Pada tahun 2018 perkembangan upah minimum naik 8,70 persen dengan angka Rp.2.755.444. Pada tahun 2019 perkembangan upah minimum naik 8,02 persen dengan angka Rp.2.967.706. Pada tahun 2020 perkembangan upah minimum naik 8,51 persen dengan angka Rp.3.230.024. Pada tahun 2021 perkembangan upah minimum tidak mengalami perubahan dengan angka upah minimum tetap. Pada tahun 2022 perkembangan upah minimum naik 1,07 persen dengan angka Rp.3.264.884. Pada tahun 2023 perkembangan upah minimum naik 7,15 persen dengan angka Rp.3.498.479. Pada tahun 2024 perkembangan upah minimum naik 4,04 persen dengan angka Rp.3.640.000. Rata-rata upah minimum Kepulauan Bangka Belitung pada periode ini yaitu Rp. 2.957.174 yang menjadikan Kep. Bangka Belitung menjadi daerah paling tinggi angka upah minimumnya.

Selama satu dekade terakhir, seluruh provinsi di Sumbagsel menunjukkan tren kenaikan UMP, dengan lonjakan terbesar terjadi setelah 2020, terutama sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kenaikan UMP dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kebijakan nasional dalam penyesuaian upah minimum. Bangka Belitung menempati posisi tertinggi karena wilayah ini memiliki biaya hidup yang lebih tinggi akibat kondisi geografis kepulauan. Selain itu, sektor utama seperti pertambangan timah dan pariwisata mendorong permintaan tenaga kerja dengan upah yang relatif lebih

tinggi. Pemerintah daerah juga aktif menjaga daya beli masyarakat melalui penyesuaian upah yang cukup agresif dalam beberapa tahun terakhir. Provinsi kedua adalah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar di wilayah ini, Sumsel memiliki struktur industri yang cukup berkembang, terutama di sektor energi, migas, dan manufaktur. Tingginya permintaan tenaga kerja formal, khususnya di daerah industri seperti Palembang dan sekitarnya, mendorong pemerintah menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi ketiga adalah Provinsi Jambi, UMP Jambi berada di posisi tengah karena meskipun memiliki sektor ekonomi kuat seperti perkebunan sawit dan pertambangan, namun sebaran industri formalnya belum merata. Banyak penduduk bekerja di sektor informal atau perkebunan skala kecil yang umumnya memiliki standar upah lebih rendah. Provinsi keempat adalah Provinsi Lampung, meski dekat dengan Pulau Jawa dan memiliki sektor pertanian yang besar, belum memiliki basis industri padat karya yang kuat. Sebagian besar pekerja berada di sektor informal, sehingga tekanan terhadap upah formal lebih rendah. Upah di Lampung tumbuh stabil namun tidak agresif, menyesuaikan dengan biaya hidup dan struktur ekonomi lokal. Provinsi dengan upah minimum terendah adalah Provinsi Bengkulu, hal ini mencerminkan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor primer, seperti pertanian dan perikanan, dengan tingkat industrialisasi dan investasi rendah. Selain itu, biaya hidup yang relatif rendah membuat tekanan terhadap kenaikan upah tidak sekuat di provinsi lain. Tingkat partisipasi tenaga kerja informal juga cukup tinggi, membatasi standar upah formal.

Berdasarkan data yang disajikan, rata-rata perkembangan Upah Minimum menunjukkan nilai yang konsisten positif pada seluruh tahun, dengan kenaikan tertinggi sebesar 10,64 dan terendah 0,67. Hal ini mengindikasikan bahwa upah minimum di wilayah tersebut selalu mengalami kenaikan setiap tahun, meskipun dengan variasi persentase yang cukup besar antar tahun. Di sisi lain, tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun dari 12,03 persen pada 2015 menjadi 9,37 persen pada 2024, dengan lonjakan signifikan pada 2020 menjadi 20,37 persen akibat kontraksi ekonomi dan pembatasan aktivitas masyarakat. Kenaikan upah

minimum dapat membantu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan daya beli masyarakat miskin yang bekerja di sektor formal. Namun, lonjakan kemiskinan pada 2020 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan ketika aktivitas ekonomi terganggu dan banyak pekerja mengalami PHK atau kehilangan pendapatan. Setelah ekonomi mulai pulih dan upah minimum kembali naik pada 2022–2024, tingkat kemiskinan menurun secara konsisten.

5.1.5 Dinamika Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator penting untuk menilai kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu negara. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik pangan maupun non-pangan, yang pengukurannya didasarkan pada tingkat pengeluaran. Sementara itu, yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan diukur dengan menghitung persentase penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. Berikut dinamika Tingkat Kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan:

Tabel 5. 5 Dinamika Tingkat Kemiskinan Masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan Tahun 2015-2024

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,60	7,58	8,09	7,63	7,58	7,10	7,90
Sumatera Selatan	14,25	13,54	13,19	12,80	12,71	12,66	12,84	11,90	11,78	10,97	12,66
Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56	15,48
Lampung	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	10,69	12,64
Kep. Bangka Belitung	4,83	5,04	5,59	4,77	4,62	4,23	4,90	4,45	4,52	4,55	4,75
TK Sumbagsel	12,03	11,72	11,42	10,81	10,56	20,37	10,73	10,03	9,81	9,37	10,69

Sumber: BPS Berbagai Provinsi, 2024

Tabel 5.5 menunjukkan data tingkat kemiskinan di lima provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan dari tahun 2015-2024. Penjelasan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi pada tahun 2015 tercatat pada angka 8,86 persen. Tahun 2016 menurun sebesar -0,45 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 8,41 persen. Tahun 2017 menurun sebesar -0,22 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 8,19 persen. Tahun 2018 menurun sebesar -0,27 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,92 persen. Tahun 2019 menurun sebesar -0,32 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,60 persen. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,02 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,58 persen. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,51 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 8,09 persen. Tetapi pada tahun 2022 menurun -0,46 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,63 persen. Tahun 2023 menurun sebesar -0,05 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,58 persen. Tahun 2024 menurun sebesar -0,48 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 7,10 persen. Rata-rata perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2015-2024 yaitu -0,20 poin.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi pada tahun 2015 tercatat pada angka 14,25 persen. Tahun 2016 menurun sebesar -0,71 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 13,54 persen. Tahun 2017 menurun sebesar -0,35 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 13,19 persen. Tahun 2018 menurun sebesar -0,39 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,80 persen. Tahun 2019 menurun sebesar -0,09 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,71 persen. Tahun 2020 menurun sebesar -0,05 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,66 persen. Tahun 2021 meningkat sebesar 0,18 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,84 persen. Tetapi pada tahun 2022 kembali menurun sebesar -0,94 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 11,90 persen. Tahun 2023 menurun sebesar -0,12 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 11,78 persen. Tahun 2024 menurun sebesar -0,81 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 10,97 persen. Rata-rata perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2024 yaitu -0,36 poin.

3. Provinsi Bengkulu

Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 tercatat pada angka 17,88 persen. Tahun 2016 menurun sebesar -0,56 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 17,32 persen. Tahun 2017 menurun sebesar -0,87 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 16,45 persen. Tahun 2018 menurun sebesar -1,02 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 15,43 persen. Tahun 2019 menurun sebesar -0,20 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 15,23 persen. Tahun 2020 menurun sebesar -0,20 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 15,03 persen. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 15,22 persen. Tetapi pada tahun 2022 kembali menurun sebesar -0,60 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 14,62 persen. Tahun 2023 menurun sebesar -0,58 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 14,04 persen. Tahun 2024 menurun sebesar -0,48 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 13,56 persen. Rata-rata perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2015-2024 yaitu -0,48 poin.

4. Provinsi Lampung

Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung pada tahun 2015 tercatat pada angka 14,35 persen. Tahun 2016 menurun sebesar -0,06 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 14,29 persen. Tahun 2017 menurun sebesar -0,60 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 13,69 persen. Tahun 2018 menurun sebesar -0,55 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 13,14 persen. Tahun 2019 menurun sebesar -0,52 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,62 persen. Tahun 2020 menurun sebesar -0,28 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,34 persen. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 12,62 persen. Tetapi pada tahun 2022 kembali menurun sebesar -1,05 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 11,57 persen. Tahun 2023 menurun sebesar -0,46 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 11,11 persen. Tahun 2024 menurun sebesar -0,42 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 10,69 persen. Rata-rata perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tahun 2015-2024 yaitu -0,41 poin.

5. Kep. Bangka Belitung

Tingkat Kemiskinan Kep. Bangka Belitung pada tahun 2015 tercatat pada angka 4,83 persen. Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,21 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 5,04 persen. Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 5,59 persen. Tetapi pada tahun 2018 menurun sebesar -0,82 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,77 persen. Tahun 2019 menurun sebesar -0,15 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,62 persen. Tahun 2020 menurun sebesar -0,39 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,23 persen. Seperti provinsi lain, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,67 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,90 persen. Tahun 2022 kembali menurun sebesar -0,45 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,45 persen. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,52 persen. Dan pada tahun terakhir masih mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin dengan nilai tingkat kemiskinan 4,55 persen. Rata-rata perkembangan tingkat kemiskinan Kep. Bangka Belitung tahun 2015-2024 yaitu -0,03 poin.

Berdasarkan data perkembangan kemiskinan lima provinsi di Sumatera bagian selatan periode 2015–2024, terlihat bahwasanya provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Bengkulu, dengan rata-rata kemiskinan mencapai 15,48 persen. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer berproduktivitas rendah serta keterbatasan kawasan industri besar. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua adalah Sumatera Selatan, dengan rata-rata 12,66 persen. Penurunan angka kemiskinan Sumatera Selatan cukup stabil karena ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, serta pertambangan batubara dan migas yang memberi peluang kerja luas, meskipun belum sepenuhnya mengentaskan kemiskinan pedesaan. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga adalah Lampung, dengan rata-rata 12,64 persen. Lampung memiliki sektor perkebunan yang luas, seperti tebu dan kopi, namun angka kemiskinan masih relatif tinggi akibat kesenjangan distribusi pendapatan dan keterbatasan nilai tambah di tingkat petani. Sementara itu, provinsi dengan tingkat

kemiskinan tertinggi keempat adalah Jambi, dengan rata-rata kemiskinan 7,90 persen, di mana sektor perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi andalan yang membantu menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir. Adapun provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung, dengan rata-rata hanya 4,75 persen, berkat aktivitas pertambangan timah, pengolahan hasil tambang, serta pariwisata bahari yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara umum, seluruh provinsi menunjukkan tren penurunan kemiskinan, meskipun sempat meningkat pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Perbedaan tingkat kemiskinan antar daerah ini erat kaitannya dengan struktur ekonomi daerah, keunggulan komoditas, dan tersedianya lapangan kerja produktif di setiap provinsi.

5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Bagian Selatan

Bagian ini membahas pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi yang berada di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel, yang mengombinasikan data time series selama periode 2015–2024 dan data *cross section* dari lima provinsi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model yang paling sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

5.2.1 Pemilihan Model

Analisis data panel dilakukan dengan menerapkan tiga jenis model estimasi, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Pada pendekatan ini, setiap unit observasi diasumsikan memiliki intersep dan kemiringan garis regresi (*slope*) yang seragam, tanpa mempertimbangkan variasi antar waktu. Untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai, digunakan metode pengujian model melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Berikut disajikan hasil dari pengujian tersebut:

1. Uji Chow untuk memilih antara model CEM dengan FEM

Tabel 5. 6 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	777.000452	(4,41)	0,0000
Cross-section Chi-square	217.063436	4	0,0000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Hipotesis yang ditentukan pada pemilihan model Uji Chow ini adalah:

- “Apabila P-Value $< \alpha$, Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat diartikan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model CEM.”
- “Apabila P-Value $> \alpha$, Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka dapat diartikan bahwa model CEM lebih baik dibandingkan dengan model FEM.”

Dari temuan estimasi tersebut telah memperlihatkan bahwasanya F test dan Chi-Square signifikan. Hal ini diakibatkan Prob. 0.0000 di bawah alfa 0,01. Maka pada model ini H_0 ditolak dan H_1 diterima. Alhasil, dapat berkesimpulan bahwasanya model *Fixed Effect Model (FEM)* lebih baik daripada model CEM (Eviews,12).

2. Uji Hausman untuk memilih antara model model FEM dengan REM

Tabel 5. 7 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3108.001706	4	0,0000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Hipotesis yang ditetapkan pada pemilihan model Uji Hausman ini diantaranya:

- “Apabila Chi-Square $< \alpha$, Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat diartikan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan dengan model REM.”

- “Apabila Chi-Square $> \alpha$, Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, maka dapat diartikan bahwa model REM lebih baik dibandingkan dengan model FEM.”

Dari hasil estimasi tersebut memperlihatkan bahwasanya nilai Chi-Square Statistik di bawah alfa 0,01 ($0,0000 < 0,01$). Maka, dapat berkesimpulan bahwasanya H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat diartikan bahwasanya *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik daripada model REM (Eviews 12).

5.2.2 Hasil Pengujian Estimasi Metode Fixed Effect Model (FEM)

Melalui pengujian regresi data panel dapat disimpulkan bahwasanya metode regresi terbaik pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dan dihasilkan regresi berikut:

Tabel 5. 8 Hasil Regresi Metode Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.663228	0.072542	9.142733	0.0000
IPM	-0.0000890	0.0000121	-7.346414	0.0000
TP	0.369388	0.098289	3.758185	0.0005
PE	0.033309	0.035425	0.940271	0.3526
UM	0.0000000243	0.00000000572	4.241046	0.0001

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil perhitungan melalui pendekatan *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dihasilkan persamaan regresi seperti berikut:

$$TK_{it} = 0,663228 - 0.0000890IPM_{it} + 0,369388TP_{it} + 0,033309PE_{it} + 0.0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Prob. = (0,0000) (0,0000) (0,0005) (0,3526) (0,0001)

Melalui hasil perhitungan statistik dihasilkan bahwa nilai konstanta dari persamaan ini ialah 0,663228. Yang mana artinya jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum tidak berubah maka Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan tidak ada.

1. Nilai koefisien IPM senilai -0,000089. Hal ini menandakan bilamana masyarakat berhasil mengakses hasil pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sebesar 1 poin maka Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan akan menurun 0,000089 persen. Temuan ini didukung oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi langsung oleh Indeks Pembangunan Manusia secara negatif.
2. Nilai koefisien Tingkat Pengangguran senilai 0,369388. Hal ini menandakan apabila Tingkat Pengangguran meningkat 1 persen maka Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan akan meningkat 0,36 persen. Temuan ini didukung oleh (Kusumo, 2019) dimana temuannya memperlihatkan pengangguran berdampak signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi senilai 0,033309. Hal ini diartikan apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat 1 persen maka Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan akan menurun 0,03 persen. Temuan ini didukung oleh (Faadihilah & Wiwin Priana Primadha, 2023) dimana temuan ini memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak membawa dampak signifikan pada kemiskinan.
4. Nilai koefisien Upah Minimum senilai 0,0000000243. Hal ini menandakan apabila Upah Minimum meningkat Rp. 1 juta maka Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan akan meningkat 2,43 persen. Temuan ini didukung oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) yang memperlihatkan bahwa dipengaruhi oleh upah minimum provinsi secara positif.

Melalui hasil estimasi dari metode *Metode Fixed Effect Model* (FEM) maka dapat dijelaskan bahwasanya setiap Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan mempunyai nilai intersep yang berbeda-beda. Adapun nilai intersep sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Hasil Nilai Intersep Masing-masing Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan

Variable	Coefficient
PROVINSIJAMBI--C	-0.022557
PROVINSISUMATERASELATAN--C	0.005490
PROVINSIBENGKULU--C	0.067037
PROVINSILAMPUNG--C	0.015512
KEPBANGKABELITUNG--C	-0.065483

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Melalui hasil regresi dengan metode *Metode Fixed Effect Model* (FEM) maka diperoleh nilai intersep setiap Provinsi di Sumatera Bagian Selatan sebagai berikut:

1. Provinsi Jambi

$$TKJAMBI_{it} = -0.022557 - 0,000089IPM_{it} + 0.369388TP_{it} + 0.033309PE_{it} + 0,0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Provinsi Jambi terpengaruh individual terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Bagian Selatan sebesar -0,022557.

2. Provinsi Sumatera Selatan

$$TKSUMSEL_{it} = 0.005490 - 0,000089IPM_{it} + 0.369388TP_{it} + 0.033309PE_{it} + 0,0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, alhasil Provinsi Sumatera Selatan terpengaruh individual pada Tingkat Kemiskinan Sumatera Bagian Selatan sebesar 0,005490.

3. Provinsi Bengkulu

$$TKBENGKULU_{it} = 0.067037 - 0,000089IPM_{it} + 0.369388TP_{it} + 0.033309PE_{it} + 0,0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum baik antar wilayah

maupun antar waktu, alhasil Provinsi Bengkulu terpengaruh individual pada Tingkat Kemiskinan Sumatera Bagian Selatan sebesar 0,067037.

4. Provinsi Lampung

$$TKLAMPUNG_{it} = 0.015512 - 0,000089IPM_{it} + 0.369388TP_{it} + 0.033309PE_{it} + 0,0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, alhasil Provinsi Lampung terpengaruh individual pada Tingkat Kemiskinan Sumatera Bagian Selatan sebesar 1,551237.

5. Kep. Bangka Belitung

$$TKKEPBANGKA_{it} = -0.065483 - 0,000089IPM_{it} + 0.369388TP_{it} + 0.033309PE_{it} + 0,0000000243UM_{it} + e_{it}$$

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum baik antar wilayah maupun antar waktu, alhasil Kep. Bangka Belitung terpengaruh individual pada Tingkat Kemiskinan Sumatera Bagian Selatan sebesar -0.065483.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bermaksud guna mengidentifikasi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas yang digunakan pada model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas pada penelitian ini diperoleh seperti berikut:

Tabel 5. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	TP	PE	UM
IPM	1.000000	-0.135745	-0.283654	0.716633
TP	-0.135745	1.000000	-0.292167	0.171279
PE	-0.283654	-0.292167	1.000000	-0.259187
UM	0.716633	0.171279	-0.259187	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari Koefisien korelasi IPM dan Perumbuhan Ekonomi senilai -0.283654 < 0,85. IPM dan Upah Minimum senilai 0.716633 < 0,85. Dan Tingkat Pengangguran

dan Upah Minimum senilai $0.171279 < 0,85$. Maka dapat berkesimpulan bahwasanya terbebas multikolinearitas atau lolos Uji Multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dijalankan dalam menilai ditemukan atau tidaknya ketidaksamaan varians dari semua yang diteliti, adapun hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu:

Tabel 5. 11 Hasil Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035395	0.035777	0.989298	0.3283
IPM	-0.00000557	0.00000597	-0.931806	0.3569
TP	0.063683	0.048476	1.313694	0.1963
PE	0.006653	0.017472	0.380791	0.7053
UM	0.00000000169	0.00000000282	0.600066	0.5518

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil pengujian yang tercantum pada tabel 5.11 dapat ditinjau bahwasanya nilai probabilitas pada setiap variabel independen mempunyai nilai yang melebihi 0,01 berdasarkan kriteria pengujian, ini memperlihatkan bahwasanya hasil uji heterkedastisitas menandakan tidak ditemukan heteroskedastisitas yang signifikan antara variabel-variabel tersebut.

5.2.4 Uji Statistik

1. Uji t

Untuk menguji signifikan kontribusi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan upah Minimum pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan secara parsial maka dipilih Uji t statistik. Digunakannya Uji t yaitu guna meninjau besaran kontribusi setiap variabel independen pada variabel dependen secara parsial melalui tingkat signifikansi 0,01 (1%). Berdasarkan output Eviews 12 maka diperoleh hasil berikut:

Tabel 5. 12 Nilai t-Statistik pada Metode FEM

Variabel	t-hitung	T-Tabel	Prob.	Ket.
IPM	-7.346414	2.01410	0.0000	Signifikan
TP	3.758185	2.01410	0.0005	Signifikan
PE	0.940271	2.01410	0.3526	Tidak Signifikan
UM	4.241046	2.01410	0.0001	Signifikan

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil uji t pada tabel maka untuk melihat secara rinci hasil setiap variabel secara parsial dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai nilai t-hitung senilai -7.346414 > t-tabel yaitu senilai 2.01410 dengan nilai probabilitas senilai 0.0000 di bawah tingkat signifikansi 0,01 (1%). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. Tingkat Pengangguran

Variabel Tingkat Penganggura mempunyai nilai t-hitung senilai 3.758185 > t-tabel yaitu senilai 2.01410 dengan nilai probabilitas senilai 0.0005 di bawah tingkat signifikansi 0,01 (1%). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menandakan bahwasanya variabel Tingkat Pengangguran berdampak signifikan pada Tingkat Kemiskinan.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai t-hitung senilai 0.940271 < t-tabel yaitu senilai 2.01410 melalui nilai probabilitas senilai 0.3526 melebihi tingkat signifikansi 0,01 (1%). Maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal tersebut mengindikasikan variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berdampak signifikan pada Tingkat Kemiskinan. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan pada Tingkat Kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera Bagian Selatan tidak dimiliki oleh daerah ini, artinya pertumbuhan ekonominya semu, karena kepemilikan faktor

produksi yang diantaranya perkebunan sawit, sektor migas itu bukan milik penduduk tetapi milik perusahaan-perusahaan dari luar Pulau Sumatera Bagian Selatan.

4. Upah Minimum

Variabel Upah Minimum mempunyai nilai t-hitung senilai $4.241046 > t$ -tabel yaitu senilai 2.01410 melalui nilai probabilitas senilai 0.0001 di bawah tingkat signifikansi 0,01 (1%). Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menandakan variabel Upah Minimum berdampak signifikan pada Tingkat Kemiskinan.

2. Uji f

Uji f dijalankan guna meninjau apakah terdapat pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan secara bersama-sama atau secara simultan. Uji f dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 (1%).

Tabel 5. 13 Hasil Uji F-Statistik Pada Metode FEM

F-Statistik	Prob. (F-Statistik)
600.7787	0.000000

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari tabel maka dapat dihasilkan bahwasanya nilai F-hitung senilai 6.067022 melalui nilai probabilitas $0,000000 < 0,01$ (1%), dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel maka F-hitung sebesar $600.7787 > F$ -tabel sebesar 2,58. Alhasil H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan upah Minimum bersama-sama berdampak signifikan pada Tingkat Kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi Adjusted R-Square adalah uji yang memperlihatkan besaran kontribusi dari variabel – variabel independen yang digunakan pada variabel dependen. Ukuran dari uji ini terdiri dari 0 sampai 1. Nilai ini mengindikasikan tingkat koefisien determinasi yang mendekati angka 0

merepresentasikan bahwa kecilnya kontribusi dari variabel – variabel bebas pada variabel terikat sedangkan bilamana nilai mendekati angka 1 mempresentasikan pengaruh yang cukup besar. Berikut ini hasil dari Koefisien determinasi *Adjusted R-Square* :

Tabel 5. 14 Hasil Uji R-squared Pada Metode FEM

R-squared	0.991542
Adjusted R-squared	0.989891

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil output evIEWS dihasilkan koefisien determinan (R^2) adalah sebesar 0.989891. Hal ini mengindikasikan bahwasanya senilai 0.989891 persen variabel Tingkat Kemiskinan ditentukan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum. Sedangkan 2 persen lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

5.3 Hasil Pembahasan

5.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat kemiskinan

Dari hasil estimasi model data panel melalui *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berdampak yang negatif dan signifikan pada Tingkat Kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan. Dengan nilai koefisien IPM adalah sebesar -0,000089, dan nilai probabilitas t-statistik senilai 0,0000 di bawah nilai signifikan 0,01 (1%) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengembangkan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan yang baik.

Temuan dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dijalankan oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kemiskinan dipengaruhi langsung oleh Indeks Pembangunan Manusia secara negatif. Lalu didukung juga dengan penelitian yang dijalankan oleh

(Muhammad Lukman k. et al., 2013) bahwasanya kemiskinan ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia.

5.3.2 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model data panel melalui *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat bahwa variabel Tingkat Pengangguran berdampak yang positif dan signifikan pada Tingkat Kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan. Melalui nilai koefisien Tingkat Pengangguran adalah senilai 0.369388, dan nilai probabilitas t-statistik senilai 0,0005 di bawah nilai signifikan 0,01 (1%) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Tingkat pengangguran terbuka termasuk salah satu indikator utama yang dapat dipilih dalam menilai angka pengangguran pada angkatan kerja. Secara umum apabila tingkat pengangguran menurun maka diharapkan tingkat kemiskinan juga akan ikut menurun.

Hasil dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Lukman k. et al., 2013) dimana hasilnya memperlihatkan bahwasanya kemiskinan ditentukan oleh tingkat pengangguran terbuka. Lalu didukung juga dengan penelitian yang dijalankan oleh (Kusumo, 2019) dimana temuannya memperlihatkan pengangguran berdampak signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.

5.3.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model data panel melalui *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat bahwa variabel Pertumbuhan ekonomi tidak berdampak yang positif dan signifikan pada Tingkat Kemiskinan masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan. Dengan nilai koefisien Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.33309 dan nilai probabilitas t-statistik senilai 0,3526 melebihi nilai signifikan 0,01 (1%) yang menandakan H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah salah satu ukuran dalam melihat bagaimana kondisi kemiskinan suatu daerah. Pada umumnya jika PDRB suatu daerah tinggi maka Tingkat Kemiskinan akan rendah. Tapi, pada penelitian ini tingginya tingkat PDRB belum sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan tersebut.

Temuan dalam penelitian ini searah dengan penelitian yang dijalankan oleh (Faadihilah & Wiwin Priana Primadha, 2023) dimana temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak membawa dampak signifikan pada kemiskinan. Lalu didukung juga dengan penelitian yang dijalankan oleh (Kusumo, 2019) dimana penelitian ini memperlihatkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak signifikan pada kemiskinan di Jawa Tengah.

5.3.4 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil estimasi model data panel dengan *Metode Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat bahwasanya variabel Upah Minimum berdampak yang positif dan signifikan pada Tingkat Kemiskinan setiap Provinsi di Pulau Sumatera Bagian Selatan. Melalui nilai koefisien Upah Minimum adalah senilai 0,0000000243, dan nilai probabilitas t-statistik senilai 0,0001 di bawah nilai signifikan 0,01 (1%) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Upah minimum merupakan patokan gaji yang ditetapkan pemerintah daerah Provinsi untuk menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan orang. Dengan upah minimum yang tinggi diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Temuan dari dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dijalankan oleh (Nurine Syarafina Khawaja Chisti, 2018) dimana temuan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya kemiskinan dipengaruhi oleh upah minimum secara positif.

5.4 Implikasi Kebijakan

Implikasi dari penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan memberikan gambaran penting bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwasanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dari peningkatan IPM, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, menjadi kunci utama. Kebijakan seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah kejuruan serta pendidikan tinggi vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal seperti

agroindustri, pertambangan, dan pariwisata akan mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan struktural. Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga harus diprioritaskan melalui penyediaan layanan kesehatan dasar yang merata, program pencegahan stunting, serta perbaikan gizi masyarakat miskin, karena kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas kerja. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tingkat pengangguran mempunyai kaitan yang erat dengan kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, semakin banyak individu atau keluarga yang kehilangan sumber pendapatan utama, sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penciptaan lapangan kerja menjadi sangat krusial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendorong hilirisasi produk unggulan daerah, seperti hilirisasi karet, kelapa sawit, kopi, dan lada, yang tidak hanya menambah nilai ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan menengah. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor padat karya, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), Selain itu, reformasi regulasi tenaga kerja perlu dilakukan agar dunia usaha lebih terdorong untuk membuka lapangan kerja baru.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif juga menjadi faktor penting yang harus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berada di daerah pedesaan dan perkotaan kecil di provinsi ini, bukan sekadar pertumbuhan angka makro yang dinikmati oleh pelaku usaha besar saja. Oleh karena itu, pemerintah harus mengarahkan kebijakan agar pertumbuhan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Ini bisa dilakukan melalui program-program perlindungan sosial, penguatan usaha mikro dan kecil, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, serta kebijakan fiskal yang progresif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menciptakan efek pemerataan, sehingga kesenjangan dapat ditekan dan tingkat kemiskinan berkurang. Kebijakan penetapan upah minimum harus memastikan keseimbangan antara kepentingan

pekerja dan kemampuan membayar perusahaan, disertai dengan pengawasan ketat implementasinya di lapangan dan penetapan upah minimum juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja juga harus diperhatikan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Peningkatan upah minimum harus diikuti dengan kebijakan perlindungan pekerja informal, seperti petani kecil, buruh tani, dan nelayan, yang selama ini tidak tercover oleh kebijakan upah minimum, melalui pemberdayaan kelompok usaha tani, koperasi nelayan, dan jaminan sosial pekerja informal. Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah provinsi di Sumatera Bagian Selatan untuk merumuskan strategi pembangunan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek kualitas hidup masyarakat dan pemerataan kesempatan kerja, sehingga pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 71,24 poin. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia terendah terdapat pada Provinsi Lampung. Rata-rata Tingkat Pengangguran di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 4,31 poin. Rata-rata Tingkat Pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Lampung. Rata-rata Tingkat Pengangguran terendah terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 4,00 poin. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi terendah terdapat pada Kep. Bangka Belitung. Rata-rata perkembangan Upah Minimum di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 6,35 persen. Rata-rata perkembangan Upah Minimum tertinggi terdapat pada Provinsi Jambi. Rata-rata perkembangan Upah Minimum terendah terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Tingkat Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan yang ditinjau dari lima Provinsi dari tahun 2015-2024 yaitu 10,69 poin. Rata-rata Tingkat Pengangguran tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu. Rata-rata Tingkat Pengangguran terendah terdapat pada Provinsi Kep. Bangka Belitung.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, dan Upah Minimum secara simultan maupun secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di masing-masing Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada Tingkat Kemiskinan di masing-masing Provinsi Pulau Sumatera Bagian Selatan.

6.2 Saran

1. Berdasarkan temuan penelitian mengenai pengaruh IPM, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap kemiskinan, pemerintah perlu lebih menekankan kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja produktif. Peningkatan IPM tanpa diiringi serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif akan berdampak minim terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, program pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan harus diarahkan pada penguatan keterampilan kerja dan kewirausahaan di sektor produktif daerah. Selain itu, penetapan upah minimum sebaiknya disertai kebijakan pendukung seperti insentif bagi UMKM agar tidak menekan kesempatan kerja, sehingga pengurangan kemiskinan dapat tercapai secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk memasukkan variabel moderasi atau mediasi seperti ketimpangan pendapatan atau struktur ekonomi daerah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai jalur pengaruh IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap kemiskinan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menguji dampak kebijakan sosial lain seperti bantuan tunai bersyarat atau program perlindungan sosial terhadap penurunan kemiskinan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif dalam literatur ekonomi pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Pratiwi, M. Y., & Afifah, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapannya Dalam Penelitian. *Education Journal*, 2(2), 1–6.
- Amara, M., & Jemmali, H. (2018). Household and Contextual Indicators of Poverty in Tunisia: A Multilevel Analysis. *Social Indicators Research*, 137(1), 113–138. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1602-8>
- Anoraga, P., & Rachmansyah, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Kota Semarang. *Jurnal AKTUAL*, 20(1), 212–222. <https://doi.org/10.47232/aktual.v20i1.157>
- Anwar, K. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Gini Rasio terhadap Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan. *Jurnal Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 9–18. <https://doi.org/10.35912/jahidik.v3i1.1993>
- Astuti, E. D., & Wijaya, R. S. (2024). Pengaruh Indikator Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang. *Jambura Economic Education Journal*, 6(2), 397–418. <https://doi.org/10.37479/jeej.v6i2.24955>
- Augustpaosa Nariman, H. T. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi IPM Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 144.
- Ayu, N. E. N., & Faisal, A. A. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies*, 1(1), 1–12.
- Bakar, A., & Faisal, M. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 2(2), 83–100. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v2i2.227>
- BPS. (2017). Indeks pembangunan manusia kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Bappeda, Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, 25, 1–47. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2017/05/02/238/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-2016.html>
- Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 259–274. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30>
- Ekonomi, P. P., Minimum, U., Terhadap, P., & Di, K. (2021). 2021. 1, 191–206.

- Faadihilah, G. F., & Wiwin Priana Primadha. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(5), 1794–1801. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1462>
- Franciari, P. S. (2012). Analisis hubungan ipm, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di indonesia. *Universitas Diponegoro*, 1–83.
- Hidayah, N. R. (2024). Analisis Dampak Pendidikan, Perumahan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 2095–2104. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3907>
- Himo, J. T., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 124–135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42238/37378>
- Huda, I. U., Karsudjono, A. J., & Darmawan, R. (2021). Analisis Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i2.5294>
- Ii, B. A. B., & Infaq, P. E. (2019). *LANDASAN TEORI A . Deskripsi Teori*. 14(2016), 8–28.
- Isnaini, S. J., & Nugroho, R. Y. Y. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 176–187.
- Kiray, P., Walewangko, & Masloman, I. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 73–84.
- Koiry, S., Kairi, B., & Pooja, P. (2024). Impact of income diversification on multidimensional poverty: Household level evidence from tea estates in Bangladesh. *Heliyon*, 10(5), e26509. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26509>
- Kusumo, B. H. (2019). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Persen). *Ekonomi Dan Bisnis*, 1–21.
- Legitaria, R. (2023). Kemiskinan: Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran Di Asean-8. *Kemiskinan: Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pengangguran Di Asean-8*, ii–62.
- Muhammad Lukman k., Khawaja, N. S., & Kaluge, D. (2013). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provisi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Tahun 2007 - 2013. 2013.

- Nandori, E. S. (2010). The effect of economic growth on poverty in Eastern Europe. *Zarządzanie Publiczne*, 1(2), 9–10. <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet>.
- NToolkit, Z., Donoghue, J., Nir, Y., Tononi, G., Media, G., Pair, T., Cable, C., Cable, C., Pair, T., Cable, F. O., Cables, T. P., Luis, F., Moncayo, G., & Adobe. (2010). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(2), 88–100. <http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>
- Nurine Syarafina Khawaja Chisti, R. K. S. (2018). *ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN*.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Pulau Sumatera. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Prakoso, E. S. (2020). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, inflasi dan investasi terhadap tingkat pengangguran di indonesia periode 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7547>
- Prasetyo, N. (2020). Risk : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020. *Risk : Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 1(2), 56–71. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jimek>
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1061. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Ramadhan, muhammad rizky. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PROVINSI ACEH TAHUN 2016-2020*. universitas islam negeri ar-raniry banda aceh.
- Rosyadah, J. A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1080–1092. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.41076>
- Santoso, D. H., Arsyi, F., Anshari Clarissa, A., Setiawan, I. N., Kurniati, E., & Delyana, S. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. 18, 1–282.
- Sari, I. (2022). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di*

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017-2021 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 5(3), 248–253.

Statistik, B. P. (2024). *Data statistik pengangguran*. 36, 1–28.

Sugiyono. (2017). *statistika untuk penelitian*. alfabeta.

Suherman, S., Neldawaty, R., Dani, R., & Markah, A. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 1319. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.646>

Sutama, I. N., Asmini, & Astika, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 281–291.

Tang, K., Li, Z., & He, C. (2023). Spatial distribution pattern and influencing factors of relative poverty in rural China. *Innovation and Green Development*, 2(1), 100030. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2022.100030>

Utami, N. D., Nurfalah, R., & ... (2022). Analisis Adanya Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...*, 1(3), 162–175. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/74%0Ahttps://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/download/74/62>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Kemiskinan, IPM, Tingkat Penganggutan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum

Provinsi	Tahun	Tk. Kemiskinan	IPM	Tk. Pengangguran	PE	Upah Minimum
Provinsi Jambi	2015	8,86	68,89	4,34	4,21	3037121
Provinsi Jambi	2016	8,41	69,62	4,00	4,37	1906650
Provinsi Jambi	2017	8,19	69,99	3,84	4,60	2063948
Provinsi Jambi	2018	7,92	70,65	3,73	4,69	2243718
Provinsi Jambi	2019	7,60	71,26	4,06	4,35	2243718
Provinsi Jambi	2020	7,58	72,29	5,13	-0,51	2630162
Provinsi Jambi	2021	8,09	72,62	5,09	3,70	2630162
Provinsi Jambi	2022	7,63	73,11	4,59	5,12	2698940
Provinsi Jambi	2023	7,58	73,73	4,53	4,67	2943033
Provinsi Jambi	2024	7,10	74,36	4,48	4,51	3037121
Provinsi Sumatera Selatan	2015	14,25	67,46	6,07	4,42	1974346
Provinsi Sumatera Selatan	2016	13,54	68,24	4,31	5,04	2206000
Provinsi Sumatera Selatan	2017	13,19	68,86	4,39	5,51	2388000
Provinsi Sumatera Selatan	2018	12,80	69,39	4,27	6,01	2595995
Provinsi Sumatera Selatan	2019	12,71	70,02	4,53	5,69	2804453
Provinsi Sumatera Selatan	2020	12,66	71,62	5,51	-0,11	3043111
Provinsi Sumatera Selatan	2021	12,84	71,83	4,98	3,58	3144446
Provinsi Sumatera Selatan	2022	11,90	72,48	4,63	5,23	3144446
Provinsi Sumatera Selatan	2023	11,78	73,18	4,11	5,08	3404177
Provinsi Sumatera Selatan	2024	10,97	73,84	3,86	5,03	3456874
Provinsi Bengkulu	2015	17,88	68,69	4,91	5,13	1500000
Provinsi Bengkulu	2016	17,32	69,33	3,30	5,28	1605000
Provinsi Bengkulu	2017	16,45	69,95	3,74	4,98	1737413
Provinsi Bengkulu	2018	15,43	70,64	3,35	4,97	1888741
Provinsi Bengkulu	2019	15,23	71,21	3,26	4,94	2040407
Provinsi Bengkulu	2020	15,03	72,93	4,07	-0,02	2213604
Provinsi Bengkulu	2021	15,22	73,16	3,65	3,27	2215000
Provinsi Bengkulu	2022	14,62	73,68	3,59	4,31	2238094

Provinsi	Tahun	Tk. Kemiskinan	IPM	Tk. Pengangguran	PE	Upah Minimum
Provinsi Bengkulu	2023	14,04	74,30	3,42	4,28	2418280
Provinsi Bengkulu	2024	13,56	74,91	3,11	4,62	2507079
Provinsi Lampung	2015	14,35	66,95	5,14	5,13	1581000
Provinsi Lampung	2016	14,29	67,65	4,62	5,14	1763000
Provinsi Lampung	2017	13,69	68,25	4,33	5,16	1908448
Provinsi Lampung	2018	13,14	69,02	4,04	5,23	2074673
Provinsi Lampung	2019	12,62	69,57	4,03	5,26	2241270
Provinsi Lampung	2020	12,34	71,04	4,67	-1,66	2430002
Provinsi Lampung	2021	12,62	71,25	4,69	2,77	2432002
Provinsi Lampung	2022	11,57	71,79	4,52	4,28	2440486
Provinsi Lampung	2023	11,11	72,48	4,23	4,55	2633285
Provinsi Lampung	2024	10,69	73,13	4,19	4,57	2716497
Kep. Bangka Belitung	2015	4,83	69,05	6,29	4,08	2100000
Kep. Bangka Belitung	2016	5,04	69,55	2,60	4,10	2341500
Kep. Bangka Belitung	2017	5,59	69,99	3,78	4,47	2534674
Kep. Bangka Belitung	2018	4,77	70,67	3,61	4,45	2755444
Kep. Bangka Belitung	2019	4,62	71,30	3,58	3,32	2976706
Kep. Bangka Belitung	2020	4,23	72,74	5,25	-2,29	3230024
Kep. Bangka Belitung	2021	4,90	72,96	5,03	5,05	3230024
Kep. Bangka Belitung	2022	4,45	73,50	4,77	4,40	3264884
Kep. Bangka Belitung	2023	4,52	74,09	4,56	4,38	3498479
Kep. Bangka Belitung	2024	4,55	74,55	4,63	0,77	3640000

Lampiran 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	164.732054	(4,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	141.870286	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: C
Method: Panel Least Squares
Date: 07/04/25 Time: 00:45
Sample: 2015 2024
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TKDES	-0.032578	0.086660	-0.375925	0.7087
IPM	0.000142	4.34E-06	32.66823	0.0000
TPDES	1.615559	0.379628	4.255640	0.0001
PEDES	0.406318	0.156174	2.601704	0.0125
UM	-3.75E-08	7.15E-09	-5.247758	0.0000
Root MSE	0.018535	Mean dependent var		1.000000
S.D. dependent var	0.000000	S.E. of regression		0.019538
Akaike info criterion	-4.938279	Sum squared resid		0.017178
Schwarz criterion	-4.747076	Log likelihood		128.4570
Hannan-Quinn criter.	-4.865468	F-statistic		-11.25000
Durbin-Watson stat	0.532471	Prob(F-statistic)		1.000000

Lampiran 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3108.001762	4	0.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	-0.000089	0.000142	0.000000	0.0000
TPDES	0.369388	1.615559	0.000395	0.0000
PEDES	0.033309	0.406318	-0.000313	NA
UM	0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TKDES

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/25 Time: 00:46

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.663228	0.072542	9.142733	0.0000
IPM	-8.90E-05	1.21E-05	-7.346414	0.0000
TPDES	0.369388	0.098289	3.758185	0.0005
PEDES	0.033309	0.035425	0.940271	0.3526
UM	2.43E-08	5.72E-09	4.241046	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.003632	R-squared	0.991542
Mean dependent var	0.106860	Adjusted R-squared	0.989891
S.D. dependent var	0.039897	S.E. of regression	0.004011
Akaike info criterion	-8.037830	Sum squared resid	0.000660
Schwarz criterion	-7.693666	Log likelihood	209.9458
Hannan-Quinn criter.	-7.906771	F-statistic	600.7787
Durbin-Watson stat	1.306072	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4 Hasil Regresi Data Panel FEM

Dependent Variable: TKDES

Method: Panel Least Squares

Date: 06/18/25 Time: 23:44

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.663228	0.072542	9.142733	0.0000
IPM	-8.90E-05	1.21E-05	-7.346414	0.0000
TPDES	0.369388	0.098289	3.758185	0.0005
PEDES	0.033309	0.035425	0.940271	0.3526
UM	2.43E-08	5.72E-09	4.241046	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.003632	R-squared	0.991542
Mean dependent var	0.106860	Adjusted R-squared	0.989891
S.D. dependent var	0.039897	S.E. of regression	0.004011
Akaike info criterion	-8.037830	Sum squared resid	0.000660
Schwarz criterion	-7.693666	Log likelihood	209.9458
Hannan-Quinn criter.	-7.906771	F-statistic	600.7787
Durbin-Watson stat	1.306072	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	TP	PE	UM
IPM	1.000000	-0.135745	-0.283654	0.716633
TP	-0.135745	1.000000	-0.292167	0.171279
PE	-0.283654	-0.292167	1.000000	-0.259187
UM	0.716633	0.171279	-0.259187	1.000000

Lampiran 6 Hasil Uji Heterkedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/25 Time: 01:01

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035395	0.035777	0.989298	0.3283
IPM	-5.57E-06	5.97E-06	-0.931806	0.3569
TPDES	0.063683	0.048476	1.313694	0.1963
PEDES	0.006653	0.017472	0.380791	0.7053
UM	1.69E-09	2.82E-09	0.600066	0.5518

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.001792	R-squared	0.278549
Mean dependent var	0.002957	Adjusted R-squared	0.137779
S.D. dependent var	0.002131	S.E. of regression	0.001978
Akaike info criterion	-9.451515	Sum squared resid	0.000160
Schwarz criterion	-9.107351	Log likelihood	245.2879
Hannan-Quinn criter.	-9.320456	F-statistic	1.978744
Durbin-Watson stat	2.382637	Prob(F-statistic)	0.073786

Lampiran 7 Hasil Estimasi Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: TK?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/01/25 Time: 22:08

Sample: 1 10

Included observations: 10

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.663228	0.072542	9.142733	0.0000
IPM?	-0.008900	0.001211	-7.346414	0.0000
TP?	0.369388	0.098289	3.758185	0.0005
PE?	0.033309	0.035425	0.940271	0.3526
UM?	2.43E-08	5.72E-09	4.241046	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
PROVINSIJAMBI--C	-0.022557			
PROVINSISUMATERAS				
ELATAN--C	0.005490			
PROVINSIBENGKULU-				
-C	0.067037			
PROVINSILAMPUNG--				
C	0.015512			
KEPBANGKABELITUN				
G--C	-0.065483			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.003632	R-squared		0.991542
Mean dependent var	0.106860	Adjusted R-squared		0.989891
S.D. dependent var	0.039897	S.E. of regression		0.004011
Akaike info criterion	-8.037830	Sum squared resid		0.000660
Schwarz criterion	-7.693666	Log likelihood		209.9458
Hannan-Quinn criter.	-7.906771	F-statistic		600.7787
Durbin-Watson stat	1.306072	Prob(F-statistic)		0.000000